

Hasil Survey:

Opini Masyarakat terkait
Pembangunan PLTA V
Peusangan

Oleh: Khairani Arifin & Rasyidah

ABSTRAK

Pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam mestilah dilakukan dengan bertanggung jawab dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar: pemberian informasi yang transparan dan lengkap, kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana dan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait. Dalam pelaksanaannya keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan sangat minim, khususnya dalam perencanaan pembangunan PLTA V Peusangan

Tujuan survey ini adalah ingin melihat .pandangan masyarakat sekitar terkait pembangunan PLTA V Peusangan, pemahaman masyarakat sekitar terkait kerugian dan keuntungan dari pembangunan PLTA V Peusangan dan melihat Persetujuan masyarakat untuk Pembangunan PLTA.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survey. Alasan mendasar penggunaan survey dikarenakan wilayah yang terdampak pembangunan PLTA V meliputi wilayah yang luas, yaitu sepanjang DAS Peusangan yang terbentang di 3 kabupaten. Sehingga representasi suara dan pendapat mereka menjadi lebih tercover melalui metode survey yang dapat megakomodir lebih banyak respondent.

Hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat disekita lokasi pembangunan PLTA sebagian besar telah mengetahui akan dibangunnya PLTA V di Kecamatan Pintu Rimee Gayo. Informasi sebaga besar diperoleh dari teman, saudara atau tetangga, dan sedikit sekali yang mendapatkan informasi dari pemerintah, termasuk aparaturnya desa. Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan PLTA sedikit sekali yang mengetahui tentang kerugian dari pembangunan PLTA, baik bagi lingkungan, sungai, koridor hewan, sungai dan dampak sosialnya, akan tetapi mereka sangat memahami tentang keuntungan dari PLTA, khususnya untuk mencukupi aliran listrik, yang selama ini dirasakan kurang dan listrik sering mati di wilayah mereka. Ketidak pahaman tentang kerugiandari pembangunan PLTA, membuat masyarakat sebagian besar menyetujui pembangunan PLTA tersebut, dan berharap dengan pembangunan PLTA arus listrik di wilayah mereka akan tercukupi/

Disarankan kepada pemerintah, agar memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kerugian dan dampak dari pembangunan PLTA bagi lingkungan, khususnya sungai, koridor hewan yang akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monev dari pembangunan PLTA V Peusangan. Sehingga masyarakat akan dapat berpartisipasi dan ikut menjadi bagian dari pengalolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Metode Penelitian.....	3
E. Lokasi Penelitian.....	5
F. Responden.....	6
BAB II.....	10
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN.....	10
A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	10
B. Kebijakan Pembangunan dan Pengelolaan SDA.....	12
C. Prinsip Pembangunan dan Pengelolaan SDA yang Berekeadilan Gender, Partisipatif dan Inklusif.....	14
D. Pembangunan PLTA dan Situasi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	23
BAB III.....	26
ALAM DAN AKTIFITAS MASYARAKAT.....	26
A. Sumber Air Keluarga.....	26
B. Aktifitas Masyarakat terkait dengan Sungai dan Hutan.....	28
BAB IV.....	32
PENGETAHUAN TENTANG PLTA PEUSANGAN.....	32
A. Pengetahuan Masyarakat tentang Pembangunan PLTA Peusangan.....	32
B. Pengetahuan Masyarakat Tentang Kerugian Pembangunan PLTA.....	40
C. Pengetahuan Masyarakat Tentang Keuntungan Pembangunan PLTA.....	46
BAB V.....	53
SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN.....	53
BAB VI.....	61
KONDISI MASYARAKAT DAN SIKAPNYA TERKAIT PEMBANGUNAN PLTA.....	61
BAB VII.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Rekomendasi.....	67

DAFTAR TABEL

7	Tabel: 1.1: Pendidikan Terakhir Responden.....	7
	Tabel: 1.2: Pendidikan terakhir Responden	8
	Tabel: 1.3: Rentang Usia Responden	9
	Tabel: 1.4: Waktu Penelitian.....	9
	Tabel:3.1: Aktivitas Masyarakat dengan Hutan Berdasarkan Jenis Kelamin	30
	Tabel: 4.1: Pengetahuan Responden dari Jenis Kelamin	33
	Tabel: 4.2: Pengetahuan Masyarakat tentang Pembangunan PLTA Peusangan dari Usia 36	
	Tabel: 4.3: Sumber informasi masyarakat tentang PLTA Peusangan Berdasarkan	
	Tingkat Pendidikan.....	36
	Tabel: 4.4: Presentase Sumber Informasi Masyarakat tentang PLTA Peusangan	
	Berdasarkan Pendidikan Terakhir	37
	Tabel: 4.5: Presentase Responden yang Mengetahui Informasi tentang Pembangunan	
	PLTA Peusangan Berdasarkan Pekerjaan	38
	Tabel: 4.6: Presentase Sumber informasi masyarakat tentang PLTA Peusangan	
	Berdasarkan Pekerjaan	39
	Tabel: 4.7: Pengetahuan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat tentang Kerugian	
	Pembangunan PLTA	45
	Tabel: 4.8: Presentase Pengetahuan Responden tentang Keuntungan Pembangunan	
	PLTA berdasarkan Jenis Kelamin	47
	Tabel: 4.9: Pengetahuan Masyarakat Tentang Keuntungan Pembangunan PLTA	
	berdasarkan Pekerjaan	49
	Tabel: 4.10: Presentase Pengetahuan Tokoh Masyarakat dan masyarakat biasa Tentang	
	Keuntungan Pembangunan PLTA	51
	Tabel 5.1: Alasan Responden Menjawab Tidak Setuju	58
	Tabel 5.2: Harapan Masyarakat Terhadap Pemerintah Terkait PLTA Peusangan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar: 1.2 : Jumlah Responden dilihat dari Jenis Kelamin	7
Gambar: 3.1 : Sumber Air Respondent	26
Gambar: 3.2 : Sumber Air Utama Keluarga Berdasarkan Desa.....	27
Gambar 3.3 : Persentase Aktivitas Masyarakat dengan sungai Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Gambar 4.1 : Informasi PLTA Peusangan akan Dibangun.....	32
Gambar 4.2: Prosentase Sumber Informasi yang Diperoleh.....	33
Gambar 4.3: Sumber Informasi terkait Rencana Pembangunan PLTA V Peusangan Dilihat dari Jenis Kelamin.....	35
Gambar 4.4: Jumlah Respondent yang Mengetahui Kerugian Pembangunan PLTA	41
Gambar 4.5: Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Kerugian Pembangunan PLTA berdasarkan Jenis Kelamin	42
Gambar: 4.6: Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Kerugian Pembangunan PLTA berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	43
Gambar: 4.7: Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Kerugian Pembangunan PLTA Berdasarkan Pekerjaan.....	44
Gambar: 4.8: Pengetahuan Respondent tentang Keuntungan PLTA.....	47
Gambar: 4.9: Pengetahuan Masyarakat Tentang Keuntungan Pembangunan PLTA Berdasarkan Usia	48
Gambar: 4.10: Persentase Pengetahuan Responden tentang Keuntungan Pembangunan PLTA Berdasarkan Pendidikan Terakhir	50
Gambar 5.1: Presentase Sikap Masyarakat Terkait PLTA.....	53
Gambar 5.2: Sikap Masyarakat Terhadap PLTA berdasarkan Jenis Kelamin	53
Gambar.5.3: Sikap Masyarakat Berdasarkan Rentang Usia	54
Gambar 5.4: Sikap Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	55
Gambar 5.5: Sikap Masyarakat Berdasarkan Pekerjaan	55
Gambar 5.6: Sikap Masyarakat Berdasarkan Status Perangkat Desa dan Masyarakat Biasa	56
Gambar 5.7: Alasan Masyarakat Menyetujui Pembangunan PLTA	57
Gambar 5.8: Alasan Masyarakat yang Tidak Setuju.....	58
Gambar 5.9: Persentase Pendapat Masyarakat	60
Gambar 6.1: Petahuan Tentang Manfaat-Kerugian dan Sikap Terhadap Pembangunan PLTA ..	61
Gambar 6.2: Prosentase Respondent yang Tahu Manfaat dan Kerugian Pemb PLTA	62
Gambar 6.3: Prosentase Respondent yang Tidak Setuju Berdasarkan Tingkat Pendidikan	63
Gambar 6.4: Prosentase Respondent Yang Tidak Setuju Berdasarkan Pekerjaan.....	64
Gambar 6.5: Respondent yang tidak setuju dan Aktifitasnya dengan sungai dan Hutan.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PLTA merupakan salah satu jenis penyedia listrik berkapasitas besar untuk memenuhi kebutuhan dasar listrik. Meskipun kehadirannya memberikan banyak manfaat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa proyek bendungan/waduk menimbulkan masalah yang kompleks. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, tidak hanya satwa tapi juga manusia.

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Aceh Timur dan Bener Meriah akan mengganggu ekosistem DAS Jambo Aye dan DAS Peusangan serta 6 (enam) Kampung di Samarkilang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Selain dampak terhadap ekonomi dan sosial masyarakat, pembangunan PLTA V Peusangan juga terindikasi mengganggu koridor Gajah di DAS Peusangan dan DAS Jambo Aye.

Berdasarkan UU NO. 32 Tahun 2009 yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri-kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup didalamnya. Unsur-unsur tersebut menyangkut benda, daya dukung, keadaan makhluk hidup, manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta makhluk didalamnya. Perbuatan atau kegiatan yang dijalankan, yang mempengaruhi lingkungan hidup dapat dibagi dalam beberapa kategori, tindak pidana pelanggaran dan kejahatan.

Di banyak kasus langkah awal yang dilakukan untuk membangun sebuah waduk adalah dengan menenggelamkan hingga puluhan desa dan memindahkan puluhan hingga ratusan ribu warga yang tinggal di kawasan tersebut. Proses pemindahan warga seringkali dilakukan secara paksa dengan

menggunakan represi militer. Setelah dipindah ke lokasi baru tak jarang kehadiran warga yang direlokasi memicu konflik horizontal dengan warga setempat.

Belum lagi mata pencaharian warga yang hilang karena ikut tenggelan atau akibat berubahnya ekosistem sungai. Warga kampung yang sebelumnya memiliki mata pencaharian yang baik, ketika dipindahkan ke lokasi lain mereka harus memulai dari awal. Seringkali di lokasi yang baru warga yang terkena dampak tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam. Mereka pun harus mencari mata pencaharian baru, yang belum tentu sesuai dengan keahliannya. Proyek pembangunan waduk di banyak tempat telah memporak porandakan kehidupan, sistem sosial dan budaya setempat. Pemerintah dan/atau pengembang tak jarang menjanjikan ganti rugi berupa perumahan disertai lahan untuk bercocok tanam serta fasilitas berupa air bersih, listrik dan jalan, namun sering kali janji ini tidak ditepati.

Untuk memastikan dampak yang akan timbul akibat pembangunan PLTA V Peusangan pada lingkungan, baik biodiversity, kawasan yang bernilai konservasi tinggi (NKT) dan sumber air di lansekap Peusangan dan Jambo Aye, Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) melalui *Shared Resources Joint Solutions* (SRJS) Aceh memandang perlu melakukan Penjaringan Opini Masyarakat yang tinggal di kawasan PLTA V akan di bangun dan juga masyarakat yang tinggal di aliran sungai Peusangan seperti Bener Meriah dan Bireun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terkait pembangunan PLTA V Peusangan
2. Bagaimana pemahaman masyarakat sekitar terkait kerugian dan keuntungan dari pembangunan PLTA V Peusangan
3. Apakah masyarakat menyetujui atau tidak pembangunan PLTA V Peusangan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar dan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui pandangan masyarakat sekitar terkait pembangunan PLTA V Peusangan
2. Mengetahui pemahaman masyarakat sekitar terkait kerugian dan keuntungan dari pembangunan PLTA V Peusangan
3. Mengetahui, apakah masyarakat menyetujui atau tidak pembangunan PLTA V Peusangan.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survey. Alasan mendasar penggunaan survey dikarenakan wilayah yang terdampak pembangunan PLTA V meliputi wilayah yang luas, yaitu sepanjang DAS Peusangan yang terbentang di 3 kabupaten. Sehingga representasi suara dan pendapat mereka menjadi lebih tercover melalui metode survey yang dapat mengakomodir lebih banyak respondent.

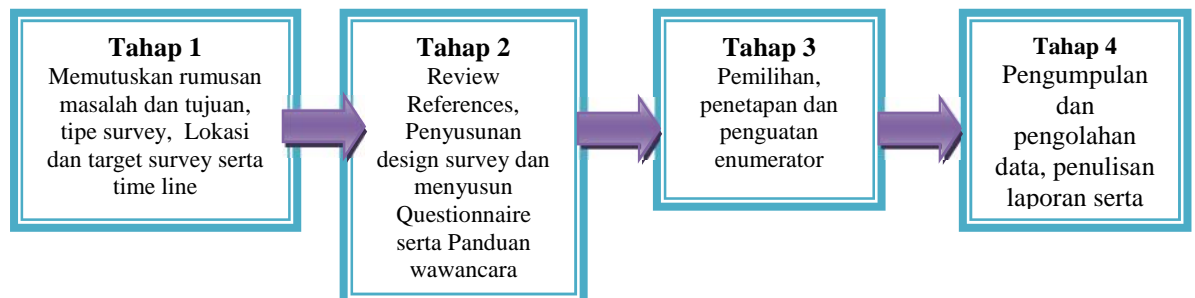
Lokasi penelitian adalah Bener Meriah, Aceh Tengah dan Biruen, khususnya masyarakat disekitar wilayah pembangunan PLTA V dan di sekitar DAS Peusangan. Jumlah respondent 200 orang yang terdiri dari: tokoh masyarakat (ulama, tokoh adat dan mukim), aparat gampong (Geuchik/Reje, Tuha Peut/Sarak Opat, Tokoh Pemuda), kelompok masyarakat (kelompok perempuan, kelompok laki-laki, kelompok rentan, anak), dan stake holder terkait (kader pos yandu, fasilitator desa, dan pekerja social). Sebaran jumlah respondent akan lebih terfokus di wilayah kabupaten yang terdampak langsung yaitu Kecamatan Silih Nara Kabupaten Bener Meriah, ditambah dengan beberapa respondent dari desa lainnya yang terletak di DAS Peusangan di Kabupaten Biruen dan Aceh Tengah. Pemilihan desa lainnya di sekitar DAS Peusangan dilakukan secara acak.

Survey yang dilakukan adalah tipe *interview survey*, dimana teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan *questionnaire* yang

ditanyakan langsung kepada respondent. Untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tiga tujuan penelitian, *questionnaire* survey dijabarkan dalam enam katagori pertanyaan survey sebagaimana diketengahkan Neuman (W. Lawrence Neuman: 2000, 247):

1. *Behavior*: terkait perilaku masyarakat yang menggambarkan intensitas aktifitasnya terkait air dan hutan yang terdampak pembangunan PLTA V
2. *Attitudes/Beliefs/Opinions*: terkait sikap dan pandangan masyarakat terhadap pembangunan PLTA V
3. *Characteristic*: Terkait karakteristik respondent yang akan diklasifikasikan berdasarkan data identitas yang tertera pada *questionnaire*. Data ini juga dapat menggambarkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang memungkinkan untuk dilakukannya analisis gender.
4. *Ecpectation*: Pada prinsipnya juga pandangan masyarakat yang berupa harapan
5. *Self Classification*: merupakan pertanyaan yang berupaya mendapatkan ketegasan terkait posisi penolakan atau penerimaan respondent terhadap pembangunan tsb.
6. *Knowledge*: pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan respondent terkait kerugian dan keuntungan pembangunan PLTA V

Lama penelitian ini berkisar dua bulan (4 Oktober-30 November 2018) yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

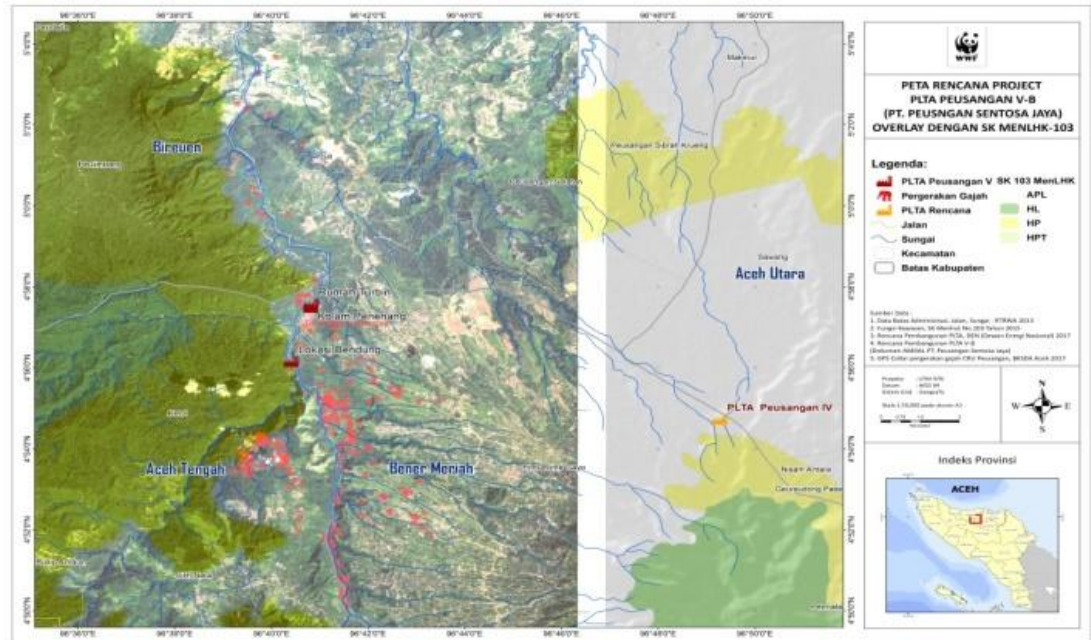


E. Lokasi Penelitian

Lokasi pembangunan PLTA akan dilakukan di Negero Antara, di Kecamatan Pintu Rimee Gayo Kabupaten Bener Meriah, Lokasi pembanguannya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar: 1.1

Peta Lokasi PLTA V Peusangan



Lokasi Penelitian di pilih di dua kabupaten yaitu, Kab Bireun dan Kabupaten Bener Meriah di desa-desa sekitar DAS Peusangan yang diperkirakan akan terdampak baik secara lingkungan, maupun secara sosial dari pembangunan PLTA V Peusangan. Di Kabupaten Bener Meriah dilakukan di 6 desa di Kecamatan Pintu Rimee Gayoo, yaitu:

1. Desa Pantan Lah
2. Negeri Antara
3. Blang Rakal
4. Alur Cincin
5. Musara Pakat
6. Alur Gading

Di Kabupaten Bireun dilakukan di 6 Desa di 3 Kecamatan yaitu, Kecamatan Juli, Kecamatan Peusangan Selatan dan Kecamatan Plimbang sebagai berikut:

1. Kecamatan Juli di 2 Desa yaitu:
 - b. Pante Pesangan
 - c. Suka Tani
2. Kecamatan Plimbang
 - a. Krueng Baro
 - b. Keude Plimbang
3. Kecamatan Peusangan Selatan
 - a. Teupin Reudeup
 - b. Kr. Beukah

Pemilihan lokasi ini berdasarkan kedekatan desa dengan DAS Peusangan yang diperkirakan akan terdampak dari pembangunan PLTA Peusangan V.

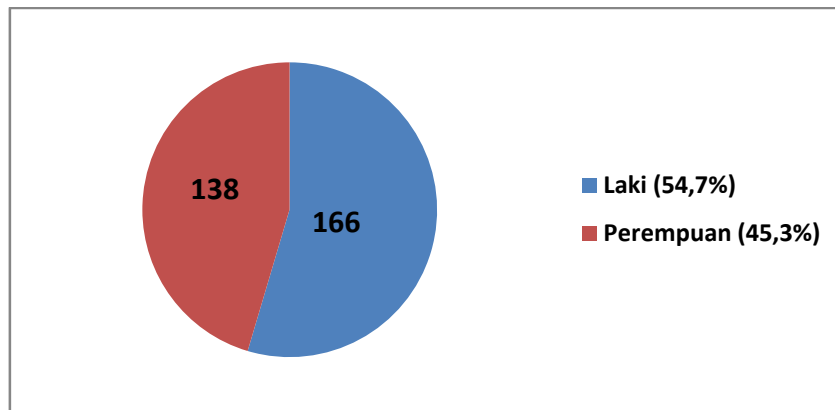
F. Responden

Responden penelitian ini terdiri dari 304 responden yang tinggal di 12 desa yang menjadi lokasi penelitian. Karakteristik responden dapat dilihat dari tabel dan matrik di bawah ini.

1. Jumlah Responden dilihat dari jenis kelamin

Jumlah responden dilihat dari jenis kelamin terdiri dari 166 laki-laki dan 138 Perempuan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Matrik berikut ini. Apabila dilihat dari persentasenya maka jumlah responden laki 54,7%, dan Perempuan 45,3%. Jumlah responden apabila dilihat dari jenis kelamin, dapat dilihat dalam matrik berikut ini.

Gambar: 1.2
Jumlah Responden dilihat dari Jenis Kelamin



2. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan terakhir Responden terdiri dari SD sampai dengan sarjana (S1), dan ada beberapa responden yang tidak bersekolah. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan responden dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel: 1.1
Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase (%)
Tidak Sekolah	7	2.3
SD/MI	92	30.3
SMP	93	30.6
SLTA	98	32.2
D-III	5	1.6
S1	9	3.0
Total	304	

3. Pekerjaan Responden

Pekerjaan responden terdiri dari berbagai profesi mulai dari yang tidak bekerja di luar rumah, termasuk ibu rumah tangga sampai dengan pegawai

negeri. Untuk mengetahui jenis pekerjaan responden dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel: 1.2
Pendidikan terakhir Responden

Pekerjaan	Jumlah	Presentase (%)
Tidak Bekerja	56	18.4
Pelajar	24	7.9
Mahasiswa	2	0.7
Petani	143	47
Wiraswasta	27	8.9
Wirausahawan	30	9.9
Buruh	8	2.6
PNS	4	1.3
Bidan/Perawat	2	0.7
Guru	4	1.3
Nelayan	2	0.7
Pensiunan	1	0.3
Teknisi	1	0.3
Total	304	

4. Rentang Usia Responden

Rentang usia responden adalah 11 sampai dengan 91 tahun, yang dibagi dalam beberapa rentang usia. Untuk mengetahui rentang usia responden dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel: 1.3
Rentang Usia Responden

Usia	Jumlah	Presentase (%)
11-20 thn	32	10.5
21-30 thn	61	20.1
31-40 thn	91	29.9
41-50 thn	63	20.7
51-60 thn	33	10.9
61-70 thn	15	4.9
71-80 thn	8	2.6
81-91 thn	1	0.3
Total	304	

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan mulai tanggal 1 Oktober sd 20 Desember 2018, Dengan Perincian sebagai berikut:

Tabel: 1.4
Waktu Penelitian

Waktu	Aktivitas	Pelaksana
1 – 4 Oktober 2018	Menyusun Desain Penelitian	Peneliti
5 – 9 Oktober 2018	Rekrutmen & Penguatan Enumerator	Peneliti & Enumerator
15 Okt 30 Oktober	Pengumpulan Data Lapangan	Peneliti & Enumerator
1- 1- 10 November 2018	Rekap data & analisis Data	Peneliti
11-30 November 2018	Penyusunan Laporan	Peneliti

BAB II

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN

A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk mengelola sumber daya alam sebijaksana mungkin. Konsep pembangunan berkelanjutan muncul manakala terdadi berbagai kegagalan dalam pembangunan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penduru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri atas 17 tujuan yaitu :

1. Tanpa kemiskinan, mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat
2. Mengakiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera, menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua manusia
4. Pendidikan berkualitas, memastikan Pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang

5. Kesetaraan gender, Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan
6. Air bersih dan sanitasi layak, menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua
7. Energi bersih dan terjangkau, memastikan akses pada energi yang terjangkau, bsia diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua orang
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua
9. Industri, inovasi dan infrastruktur, .membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10. Berkurangnya kesenjangan, mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara negara
11. Kota dan komunitas berkelanjutan, membuat perkotaan menjadi inklusif, aman dan kuat, dan berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13. Penanganan perubahan iklim, mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
14. Ekosistem laut, perlindungan dan penggunaan Samudra, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
15. Ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh, mendorong masyarakat adil, damai dan inklusif
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

Selain itu pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan prinsip prinsip dasar berkelanjutan termasuk dalam pembangunan PLTA yaitu :

1. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan di masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi di masa depan dalam memenuhi kebutuhan mereka
2. Pembangunan berkelanjutan mencakup pengentasan kemiskinan, penghormatan pada hak asasi manusia, perubahan pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan, kelangsungan ekonomi jangka Panjang, perlindungan dan pengelolaan dasar sumber daya alam serta pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab
3. Pembangunan berkelanjutan menyerukan agar mempertimbangkan sinergi dan pertukaran (trade-off) antara nilai nilai ekonomi, sosial dan lingkungan. Keseimbangan ini harus dapat dicapai dan dijamin secara transparan dan bertanggung jawab dengan mengambil manfaat dari perkembangan pengetahuan, beragam sudut pandang dan inovasi
4. Tanggung jawab sosial, transparansi dan akuntabilitas adalah inti dari prinsip prinsip yang berkelanjutan
5. Apabila PLTA dibangun dan dikelola secara berkelanjutan dapat menghasilkan manfaat nasional, regional dan lokal serta memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam membantu masyarakat mencapai tujuan pembangunan.

B. Kebijakan Pembangunan dan Pengelolaan SDA

Kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada masyarakat adat, lokal dan bukan berpusat kepada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu. Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dioptimalkan karena sumber daya alam sangat penting peranannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dengan otonomi daerah pendelegasian secara bertahap wewenang pemerintah pusat ke daerah

dalam pengelolaan sumber daya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap terjaganya fungsi lingkungan¹.

Pemanfaatan SDA secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat meningkatkan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam kecukupan pangan semua penduduk di Indonesia. Oleh karena peran pemerintah dalam memberikan kebijakan tentang peraturan pengelolaan SDA yang penting sebagai langkah menjaga SDA yang berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran kebijakan tersebut diterapkan. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Pp No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom².

Penguatan landasan hukum serta pembenahan kebijakan dan peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan hutan merupakan "*conditio sine qua non*" agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Kedua hal tersebut diperlukan untuk penataan ulang tata ruang wilayah, tata guna lahan, penataan hak-hak atas lahan, perbaikan tata kelola perizinan, penyelesaian berbagai konflik, serta berbagai persoalan teknis di lapangan, dan penegakan hukum.

Diperlukan suatu reformasi kerangka hukum yang kuat, jelas, dan harmonis terkait pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan gambut. Esensinya adalah pengembangan kerangka hukum kehutanan yang berkesinambungan dengan isu perubahan iklim yang merupakan penerjemahan dari Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan

¹[http://www.academia.edu/9280542/Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup](http://www.academia.edu/9280542/Kebijakan_Nasional_dan_Daerah_dalam_Pengelolaan_Lingkungan_Hidup)

² <https://www.bappenas.go.id/files/2913/5080/2316/bab-x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkungan-hidup.pdf>

Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya alam. Kerangka ini berfungsi sebagai penyelaras dalam melakukan pembaruan serta penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam. Pasal 4 Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 menetapkan dua belas prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Prinsip-prinsip tersebut apabila diringkaskan, menurut Ida Nurlinda dengan mengutip Maria S.W. Sumardjono, akan berpangkal pada tiga prinsip utama, yaitu:

- a. Prinsip demokratis, dalam dimensi kesetaraan antara pemerintah dan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan *good governance* dalam penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria;
- b. Prinsip keadilan, dalam dimensi filosofis, baik keadilan intergenerasi maupun keadilan antargenerasi dalam upaya mengakses sumberdaya agraria;
- c. Prinsip keberlanjutan, dalam dimensi kelestarian fungsi dan manfaat yang berdaya guna dan berhasil guna.

Ketiga prinsip utama tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Manakala berbicara prinsip demokrasi, terkandung di dalamnya makna prinsip keadilan. Manakala berbicara prinsip keadilan, terkandung di dalamnya makna prinsip berkelanjutan.

C. Prinsip Pembangunan dan Pengelolaan SDA yang Berekeadilan Gender, Partisipatif dan Inklusif

Keadilan Gender dan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sejak awal proses manusia mulai memanfaatkan alam untuk bertahan dan melanjutkan hidup maka sejak itu pulalah nilai-nilai gender terintegrasi dan terbukti mampu menjaga keseimbangan alam selama bertahun-tahun. Ketika nilai-nilai tersebut dianggap melekat pada perempuan, artinya perempuan telah memiliki pengalaman yang lebih dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, telah juga memiliki akses dan kontrol dalam mengelola

sumber daya alam dan dalam pengambilan keputusan, tidak hanya merawat dan menjaga namun juga sampai ke teknologinya.

Perempuan dan kelompok rentan harus memperoleh akses dan kontrol dalam pengelolaan Sumber Daya Alam bahkan sampai pengambilan keputusannya, karena dalam pembagian kerjanya secara gender perempuan terlibat dalam proses produksi, pemeliharaan dan perawatan. Kondisi saat ini, ketika terjadi komodifikasi Sumber Daya Alam, perempuan mendapatkan kesenjangan (tertinggal) dalam banyak hal bahkan lama kelamaan menjadi terpinggirkan dalam proses keberlanjutan pengelolaan Sumber Daya Alam. Realitasnya perempuan adalah pemeran utama dalam mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga yang berbasis pada Sumber Daya Alam. Dengan upayanya memanfaatkan, menjaga dan melestarikan Sumber Daya Alam.

Kondisi perempuan dan kelompok rentan dalam pengelolaan dan keberlanjutan Sumber Daya Alam itu semakin parah dan membebannya ketika terjadi konflik Sumber Daya Alam melawan pemilik modal. Di satu pihak, dalam situasi konflik para perempuan ini tetap harus mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya tetapi di lain pihak dia tidak punya akses terhadap pengetahuan ekonomi politik yang berhubungan dengan konflik Sumber Daya Alam dan juga tidak punya kontrol terhadap upaya survival untuk komunitas yang sedang berkonflik. Persisnya upaya survival perempuan pada saat konflik Sumber Daya Alam tidak pernah diakui sebagai peran signifikan dalam melawan pemodal yang hendak menghancurkan Sumber Daya Alam. Maka posisi marginal perempuan dalam situasi konflik berdampak pada beban ganda yang harus ditanggungnya, karena itulah menjadi penting untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengelolaan Sumber Daya Alam demi membebaskan perempuan dari beban ganda sebagai entitas yang marginal serta bagian dari usaha membangun pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkeadilan.

Kerangka pemikiran gender dan Sumber daya alam, harus dilihat dari pengalaman pribadi perempuan, termasuk apa-apa ataupun hal-hal yang diungkapkannya sebagai sebuah pola komunikasi khas perempuan atau kebiasaan dapat disebut “pengetahuan” (*knowledge*). Sedangkan relasi antar dua orang perempuan dalam menjalani aktivitas ritual keseharian dan berbagai bentuk keragaman solidaritas antar perempuan merupakan bagian dari “kelembagaan perempuan” (*women institutional*).

Dari hasil eksplorasi dari tiga hal tersebut yakni pengetahuan, akses dan kontrol serta kelembagaan perempuan maka kemudian akan dilanjutkan lagi dengan melihat bagaimana relasi gender (hubungan laki-laki dan perempuan), relasi sosial (hubungan kelas sosial) dan relasi kekuasaan akan mempengaruhi proses reproduksi pengetahuan perempuan meliputi ketiga hal diatas dalam pengurusan kekayaan alam dan sumber kehidupan.

Beberapa hal yang menjadi kelebihan dari konsep gender dan SDA adalah sebagai sebuah landasan teoritik dalam melakukan suatu analisa adalah kemampuannya untuk menyediakan kerangka interdisiplin untuk memahami gender, ras, budaya, etnis dan kelas dalam mempengaruhi proses perubahan ekologis dan sumber daya alam. Perempuan juga tidak dianggap sebagai entitas yang homogen, tidak melakukan esensialisasi terhadap perempuan dengan menyetarakan proses operasi (pengekangan/penindasan) terhadap perempuan dengan proses pengrusakan lingkungan oleh pemegang kekuasaan dan pemilik modal. Dalam ekologi politik feminis aspek kelas, etnisitas, usia, seksualitas, status perkawinan, wilayah hidup (desa, kota, pegunungan dll) merupakan aspek penting yang membuat setiap perempuan memiliki keragaman pengalaman, peran, fungsi dan posisi dalam hubungan sosial dan lingkungannya.

Tiga pendekatan utama yang membangun gender dan sumber daya alam menurut pendekatan pascastrukturalis, gender dan hak kepemilikan dan hak guna, ketiga hal tersebut juga saling melengkapi satu sama lainnya. *Pascastruturalis*, yang dimaksudkan Schubart dalam pascastrukturalis ini terutama adalah pendekatan dekonstruktif yang mempertanyakan diskursus dominan dari perubahan dan kebijakan lingkungan. Mengutip Escobar (1996), analisis poststruktural adalah analisis produksi realita sosial yang meliputi analisis representasi fakta sosial yang tidak terpisahkan dari apa yang umumnya disebut realita material. Elemen lain yang ditekankan dalam pendekatan pascastrukturalis adalah pengkonstruksian realita lingkungan dengan menggunakan diskursus ilmiah. Suatu wilayah terkonstruksi menjadi berbahaya atau perlu dilindungi, menurut Schubart merupakan hasil dari pendefinisian oleh diskursus ilmiah. Masyarakat akan mempersepsikan resiko lingkungan akan menjadi nyata tidak lama lagi dan tindakan mereka berdampak pada lingkungan, terutama akan bergantung pada agenda politik dan liputan media³. Menurut Harrison dan Burgess (1994), hal ini terjadi misalkan ketika alam digambarkan sebagai korban tak berdosa dari keserakahan manusia.

Gender, analisis gender dalam menganalisis konsep manusia dan lingkungan dikategorikan yang melakukan dekonstruksi definisi interaksi antara manusia dengan alam. Gender dipilih Schubart karena merupakan diskursus akademis yang menonjol yang didasarkan pada latar belakang keadilan gender. bahwa gender adalah tema penting bagi para peneliti ekologi politik. Mereka berpendapat gender dapat mempertajam relasi alam-masyarakat dan oleh karena itu fundamental untuk memahami akses sumber daya dan degradasi lingkungan. Gender dalam ekologi politik feminis diambil dari dua arus pemikiran yaitu konsep gender dan lingkungan, dan ekofeminisme. Gender dan lingkungan mengintegrasikan dan mempromosikan perempuan sebagai pemeran utama dalam program

³ Jon Schubart dalam ,Ester Lianawati, 2009

pembangunan lingkungan. Konsep gender dan SDA berusaha mengidentifikasi peluang dan kendala yang mempertajam perilaku penggunaan lahan yang tergenderkan yang penekanannya bukan pada generalisasi mengenai perempuan dan alam, melainkan pada level realitas lokal.

Pendekatan hak kepemilikan dan hak guna, dalam konteks ekologi politik, adalah penting untuk menyadari bahwa sumber daya alam tidak hanya terbatas pada benda-benda yang aksesnya tak terbatas. Pengertian sumber daya alam bukanlah benda-benda yang terbuka terhadap semua orang, melainkan bahwa mereka diatur oleh *kebijakan tentang penguasaan lahan*. Hak menggunakan dan kepemilikan yang terinstitusionalisasi ini disebut dengan *entitlements*. Individu dapat memilikinya sebagai pemberian/anugerah (*endowments*) yang kemudian dapat diubah menjadi '*entitlements*'. *Endowments* merupakan hasil negosiasi di antara institusi dan pelaku sosial. Menurut Leach *et al*, stratifikasi sosial, distribusi properti, dan hak penggunaan yang tidak setara membuat tidak mungkin untuk memaksakan strategi manajemen sumber daya yang bersifat tunggal pada komunitas lokal. Ekologi politik memaknai lingkungan alam sebagai ruang untuk manusia dapat beraksi, namun pada saat yang sama, dimodifikasi oleh aksi tersebut. Penelitian yang dilakukan Leach *et al* memperlihatkan bagaimana institusi formal dan informal menentukan distribusi kepemilikan yang senantiasa berubah (*ever-changing*) yang dimiliki pelaku-pelaku sosial.

Pendekatan gender dan pengelolaan SDA yang berpusat pada hak ini sebenarnya masih terkait dengan pendekatan gender di atas. Khususnya dalam hal hak dan kewajiban yang berperspektif gender. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya pemisahan akses terhadap sumber daya alam berdasarkan gender. Perempuan dan laki-laki sering membedakan hak dan kewajibannya dalam produksi, menciptakan dan memelihara lingkungan biofisik yang sehat, serta hak dan kewajiban mereka untuk menentukan

kualitas hidup dan sifat alami lingkungan hidup. Pemisahan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan juga terjadi dalam aspek ruang. Contohnya wilayah akses dan kendali laki-laki dan perempuan sering dipisah antara ruang publik dan privat. Dalam hal ini nantinya akan terkait bahwa bukan hanya pemisahan akses terhadap sumber daya alam, melainkan juga dalam hal mendapatkan dan mengelola sumber daya tersebut. Hak kepemilikan dan hak guna laki-laki sering diasosiasikan dengan *de jure*, yakni sah berdasarkan yurisprudensi. Sedangkan perempuan lebih diasosiasikan dengan hak atas sumber daya alam *de facto*, yakni hanya berdasarkan praktik kebiasaan. Menurut Rocheleau *et al*, hal ini akan berimplikasi besar pada relativitas kekuatan dan keamanan hak berdasarkan gender.

Dengan tiga pendekatan utama tersebut, konsep Gender dan pengelolaan SDA telah berhasil melihat permasalahan lingkungan dengan lebih komprehensif. Khususnya penempatan gender sebagai salah satu analisis utama telah membuka pandangan yang lebih luas untuk melihat opresi terhadap perempuan. Lebih jauh lagi adalah analisis akses dan kontrol yang berperspektif gender juga telah membuat studi ini dapat melihat lebih dalam akar permasalahan yang terjadi. Konteks lokalitas yang dikaji juga telah membawa keunikan permasalahan masing-masing daerah, yang tidak ditangkap oleh studi-studi sebelumnya

Laki-laki dan perempuan dalam memberi tanggapan terhadap krisis ekologi (perubahan iklim, cara tanam, dll) berbeda kepentingan. Kepentingan perempuan terhadap lingkungannya secara keseluruhan (produksi, reproduksi sosial, seksualitas/tubuh, kelembagaan sosial) bertujuan untuk “survival” keluarga dan komunitas. Karena kepentingan perempuan terfokus untuk keluarga dan komunitas maka perempuan kehilangan hak atas otonomi dirinya. Dan sebaliknya perempuan dibebani oleh tanggungjawab untuk keberlangsungan sumber daya alam dan sosial.

Komitmen pemerintah untuk mengiegrasikan gender dan inklusi sosial dalam pengelolaan lingkungan telah dinyatakan secara tegas dlam berbagai dokumen kebijakan. Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkunagn Hidup, dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa undang-undang ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukun dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 huruf g disebutkan bahwa: “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia”. Sementara itu dalam Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa: Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Ketentuan dalam undang-undang ini menunjukkan bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa seluruh kementerian, gubernur, bupati/walikota di instruksikan untuk: “melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing”. Tujuan dari PUG adalah untuk Terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan

gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Landasan hukum formal dan konstitusional telah menjamin perlunya partisipasi aktif perempuan bersama laki-laki dan kelompok rentan dalam pengelolaan lingkungan hidup, namun realitasnya menunjukkan masih terbatasnya kesempatan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk menjamin integrasi keadilan gender dan inklusi sosial dalam pengelolaan SDA harus dipastikan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Kesamaan akses** untuk perempuan berpartisipasi secara optimal bersama laki-laki serta kelompok rentan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan SDA
2. **Kesamaan partisipasi** perempuan dan laki-laki serta kelompok rentan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan SDA.
3. **Peningkatan kontrol** perempuan dan laki-laki serta kelompok rentan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan SDA.
4. **Adanya jaminan**, agar perempuan, laki-laki dan kelompok rentan memperoleh manfaat yang setara dalam pengelolaan SDA.

Untuk menjamin integrasi keadilan gender dan inklusi sosial, perlu didukung oleh kelembagaan yang kuat di berbagai tingkatan berupa *Gender dan Social Inclusion Focal Point* maupun kelompok kerja yang mempunyai kepekaan untuk berperan sebagai inisiator, advokator, dinamisator dalam mengintegrasikan keadilan gender dan inklusi sosial dalam pengelolaan SDA.

Strategi yang dapat dilakukan:

1. *Affirmative action* untuk menjamin keterwakilan perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, dimana keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu diintegrasikan dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup.
3. *Capacity building*, baik terhadap individu sebagai *focal point* maupun terhadap kelompok kelompok kerja.

Kebijakan yang adil gender merupakan upaya untuk memunculkan hak perempuan (yang dihilangkan) terhadap akses dan kontrol sumber daya alam. Realitas aktualnya, perempuan sangat dibebani tanggungjawab untuk *survival* (mempertahankan keberlangsungan) sumber daya alam. Hak perempuan untuk memiliki akses dan kontrol sumber daya alam meliputi pengambilan keputusan untuk memanfaatkan sumber daya alam guna keberlangsungan/*survival* atas tubuh/seksualitas, sistem produksi, sistem reproduksi sosial dan kepemimpinan dalam kelembagaan sosial. Untuk memunculkan hak perempuan diperlukan prasyarat adanya ruang sosial yang kondusif untuk mengemukakan pendapat (suara) yang dihilangkan baik secara *de facto* maupun *de jure*.

Harus diciptakan sistem dan mekanisme yang memastikan adanya kesempatan perempuan menduduki posisi strategis dalam kelembagaan sosial dan menentukan jenis-jenis kerja pilihannya. Harus diciptakan program untuk melembagakan sistem dan mekanisme adil gender dalam wadah seperti keluarga, dan organisasi komunitas disertai sarana pendukungnya yang meliputi pendidikan dan sistem informasi. Untuk memunculkan hak perempuan terhadap sumber daya alam diimplementasikan dengan metode “*cultural action*” (membongkar relasi kuasa di dalam sistem pengetahuan serta membangun otonomi pribadi perempuan dengan sumber daya alam). Selain semua hal tersebut diatas, yang juga harus diperkuat adalah melibatkan

seluruh stake holder yang ada seperti pemerintah baik di lokal maupun nasional, organisasi lainnya.

D. Pembangunan PLTA dan Situasi Sosial Ekonomi Masyarakat

PLTA merupakan salah satu jenis penyedia listrik berkapasitas besar untuk memenuhi kebutuhan dasar listrik. Meskipun kehadirannya memberikan banyak manfaat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa proyek bendungan/waduk menimbulkan beragam masalah yang kompleks. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Tidak hanya saat awal pembangunannya, namun selama hayati PLTA itu sendiri. Di banyak kasus, langkah awal yang dilakukan untuk membangun sebuah waduk adalah dengan menenggelamkan hingga puluhan desa dan memindahkan puluhan hingga ratusan ribu warga yang tinggal di kawasan tersebut. Proses pemindahan warga seringkali dilakukan secara paksa dengan menggunakan represi militer. Setelah dipindah ke lokasi lokasi baru tak jarang kehadiran wwarga yang direlokasi memicu konflik horizontal dengan warga setempat. Belum lagi mata pencaharian warga yang hilang akibat ikut tenggelam atau akibat berubahnya ekosistem sungai. Warga kampung yang sebelumnya memiliki mata pencaharian yang baik, ketika dipindahkan ke lokasi lain mereka harus memulainya kehidupan dari awal. Seringkali lokasi yang baru, warga yang terkena dampak tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam. Mereka harus mencari mata pencaharian baru, yang belum tentu sesuai dengan keahliannya.

Selain itu, habitat bagi kekayaan keanekaragaman hayati dunia, termasuk flora dan fauna langka, berbagai cagar budaya penting, dan makam leluhur tak jarang ikut tenggelam di dasar waduk. Seluruh ekosistem sungai ikut rusak, tanpa bisa dikembalikan ke kondisinya awal. Proyek pembangunan waduk di banyak tempat telah memporak porandakan peri kehidupan, sistem sosial dan budaya setempat. Pemerintah dan/atau pengembang tak jarang menjanjikan ganti rugi berupa perumahan disertai lahan untuk bercocok tanam serta

fasilitas berupa air bersih, listrik, dan jalan. Namun seringkali semuanya hanya janji palsu.

Beberapa masalah yang sering muncul dengan dibangunnya PLTA :

1. Masalah Teknis
 - a. Sebagian PLTA yang beroperasi saat ini, kapasitas bangkitannya lebih kecil dari target perencanaannya.
 - b. Tingginya sedimentasi di waduk akibat alih fungsi lahan di daerah tangkapan air menghambat kerja turbin air
 - c. Berkurangnya kapasitas penampungan air di waduk akibat sedimentasi, sehingga berpotensi merendam pemukiman di sekitar saat curah hujan tinggi
 - d. Pengembangan PLTA belum memperhitungkan dampak perubahan iklim (misalnya musim kemarau Panjang dan curah hujan ekstrem) terhadap air sungai.
2. Masalah Sosial
 - a. Masyarakat yang tinggal di wilayah proyek harus direlokasi
 - b. Munculnya konflik di tempat relokasi, antara warga yang direlokasi dengan warga setempat
 - c. Menurunnya kualitas hidup warga yang harus direlokasi dari lahannya
 - d. Masyarakat yang tempat berkerjanya tergusur proyek, harus mengganti mata pencahariannya
 - e. Terganggunya pemanfaatan air di hilir bendungan misalnya untuk pertanian dan perikanan
 - f. Masyarakat di hulu menjadi lebih rentan terhadap banjir karena aliran sungai yang tertahan bendungan
 - g. Masyarakat di hilir terancam bahaya banjir karena pintu air di hilir harus dibuka ketika curah hujan tinggi, sementara waduk tidak sanggup menampung volume air
 - h. Terganggunya fungsi air sungai dari sisi sosial dan budaya karena ditenggelankannya situs situs cagar.
3. Masalah Lingkungan

- a. Hilangnya habitat terestrial akibat genangan waduk
- b. Terganggunya keseimbangan ekosistem sungai akibat perubahan fluktuasi debit alami dari aliran sungai di daerah hilir
- c. Terganggunya migrasi ikan dan spesies air tawar lainnya akibat kehadiran bendungan
- d. Sedimen dan nutrient yang tertahan di bendungan mengganggu berbagai spesies di daerah hilir
- e. Berkurangnya pasokan sedimen dan nutrient bagi ekosistem hutan bakau
- f. Pembangunan PLTA membuka akses akan kawasan hutan sehingga rawan terhadap aktifitas penebangan hutan.

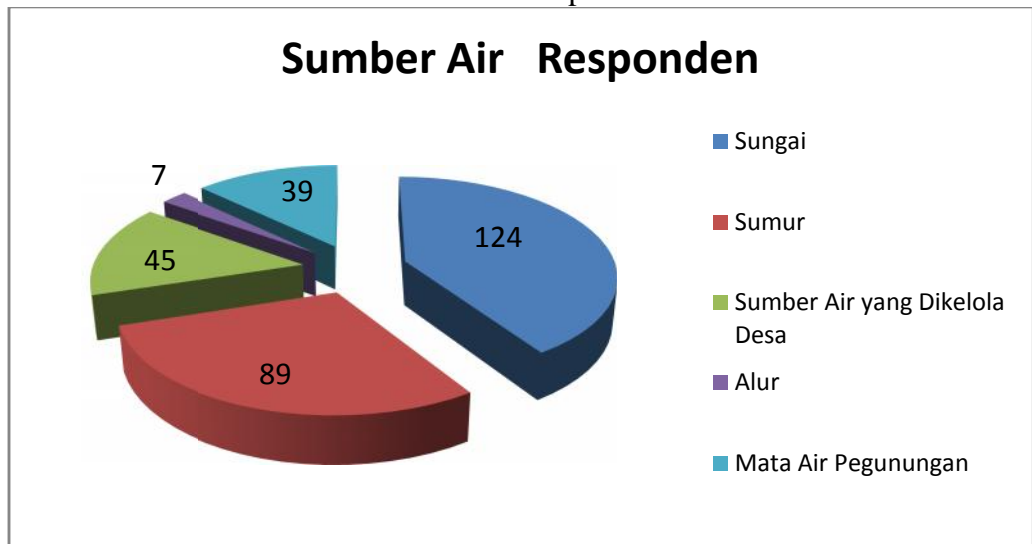
BAB III ALAM DAN AKTIFITAS MASYARAKAT

A. Sumber Air Keluarga

Dari hasil survey yang dilakukan diketahui bahwa masyarakat di sekitar lokasi penelitian sebagian besar menjadikan sungai sebagai sumber air keluarga. Sungai bagi masyarakat menjadi sumber dari berbagai kebutuhan air, seperti mandi, mencuci, dan berbagai kebutuhan lainnya. 305 Responden di Lokasi penelitian di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireun 41 % mengandal sumber air keluarga dari sungai, 29% dari sumur, 14, 7 % dari Sumber air bersih yang dikelaola oleh desa dan atau daerah, 12 % dari mata Air, sedangkan sisanya 3,3 % dari berbagai sumber air lainnya, seperti bendungan, alur dan lainnya.

Untuk lebih jelas mengenai sumber air keluarga 304 orang responden dapat dilihat dari matrik berikut:

Gambar: 3.1
Sumber Air Respondent

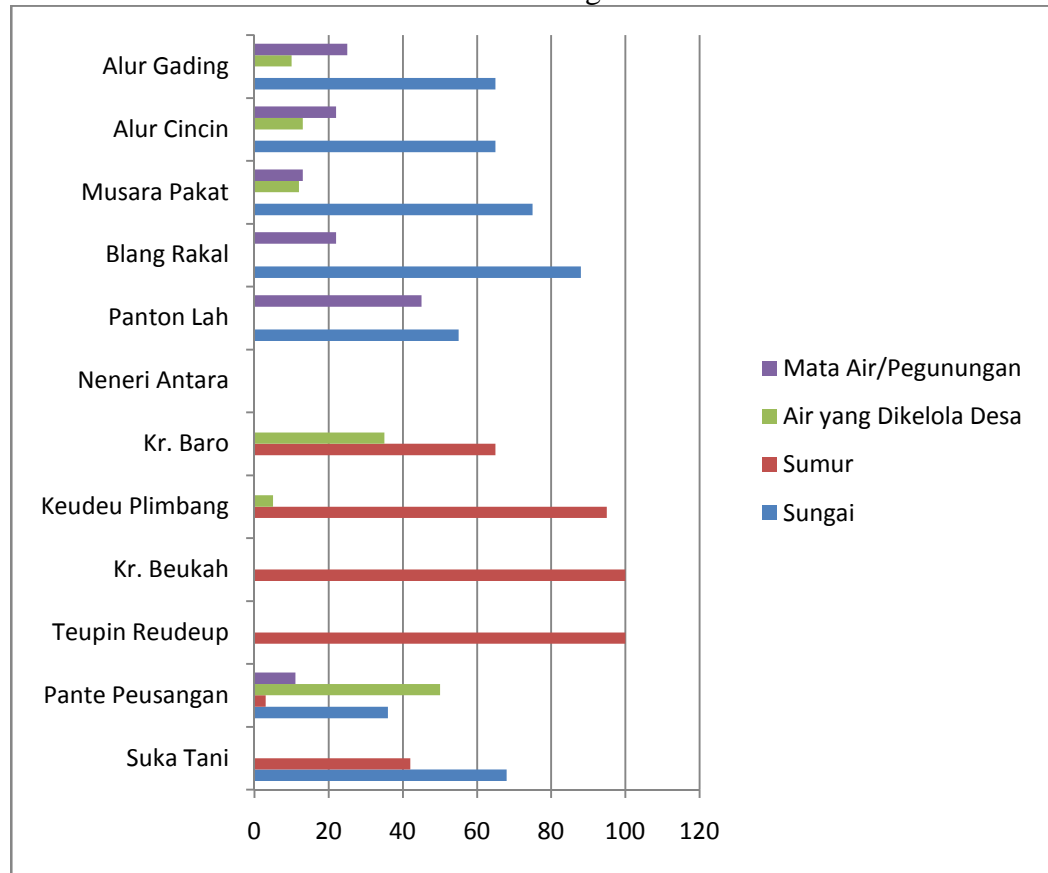


Dari gambar di atas terlihat bahwa, sumber air keluarga terbesar adalah sungai sebanyak 124 responden (40,8%) menggunakan sungai sebagai sumber air keluarga, dan 89 responden atau 29,3% menggunakan sumur,

selebihnya menggunakan sumber air yang dikelola desa (14,8%) dan selebihnya menggunakan mata air dan air pegunungan serta alur sebagai sumber air keluarga. Ketergantungan masyarakat di lokasi penelitian masih sangat besar sebagai sumber air keluarga, jadi kelestarian sungai, dan memastikan sungai terus mengalir secara baik menjadi suatu keharusan, untuk menjaga sumber air masyarakat berikut seluruh habitat yang ada di dalamnya.

Apabila dilihat berdasarkan desa, maka sumber air terbesar masyarakat di 12 lokasi penelitian dapat dilihat seperti di bawah ini.

Gambar: 3.2
Sumber Air Utama Keluarga Berdasarkan Desa



Dari matriks di atas dapat dijelaskan bahwa dari 12 desa yang menjadi lokasi penelitian, 8 desa sumber air utama dan terbesar masyarakatnya adalah dari sungai. Dilihat dari gambar di atas, 5 desa di Bener meriah 43% sd 88% responden menggunakan sungai sebagai sumber air bersihnya, 2 desa dari sumber air yang dikelola oleh desa, dan 1 desa dari

Aliran air dan mata air. Jadi sungai adalah merupakan sumber air utama masyarakat yang tinggal di daera aliran sungai, sedangkan yang tinggal jauh dari daerah aliran sungai, sumber air utama masyarakatnya adalah sumur, dan sumber air yang dikelola oleh desa, yang umumnya berasal dari sungai atau mata air. Di lokasi penelitian di Kaupaten Bireun, dari 6 lokasi penelitian 2 desa menjadikan sungai sebagai sumber air keluarga, selebihnya menggunakan sumur dan sumber air yang dikelola desa.

B. Aktifiats Masyarakat terkait dengan Sungai dan Hutan

1. Aktivitas Terkait dengan Sungai

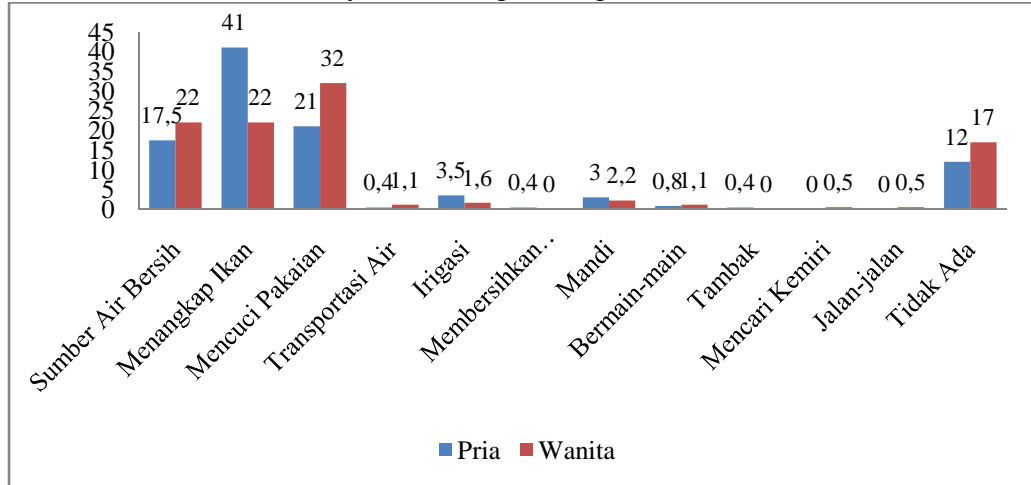
Pengaturan tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia dapat dilihat di UU D Dasar 45 Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Akan tetapi masyarakat Indonesia saat ini masih belum dapat mengkses air bersih untuk mememnuhi kebutuhan hiduo mereka. Sehingga masyarakat mencari dan memanfaatkan berbagai sumber air yang ada di sekitarnya, termasuk yang paling banyak adalah sungai.

Sungai merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sehari –hari. Sungai tidak hanya terdapat pada daerah pedesaan dan pegunungan, namun juga pada daerah perkotaan. Sungai bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Bagi masyarakat yang tinggal di sekita aliran sungai, keterkaitan masyarakat dengan sungai sangat besar.

Bagi Kehidupan masyarakat di lokasi penelitian, sungai bukan sekedar sumber air bersih keluarga. Mereka juga memanfaatkan sungai untuk berbagai kebutuhan lainnya. Jumlah laki-laki yang menggunakan sungai dengan perempuan dapat dilihat bahwa laki-laki sebagian besar memanfaatkan sungai untuk kegiatan ekonomi seperti menangkap ikan, dan perempuan menggunakan seungai sebagai sumber air bersih dan dan mencuci pakaian. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pemanfaatan

sungai oleh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dapat dilihat dalam matriks berikut:

Gambar 3.3
 Persentase Aktivitas Masyarakat dengan sungai Berdasarkan Jenis Kelamin



Dari matriks di atas dapat dijelaskan bahwa aktivitas 304 responden, terbanyak di 12 desa di lokasi penelitian, terkait dengan sungai adalah menangkap ikan, mencuci pakaian, dan sebagai sumber air bersih (masak dan mandi). Menangkap ikan dilakukan oleh laki dan perempuan, walaupun presentasi laki-laki lebih banyak (41%) dan Perempuan 22%. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan dalam masyarakat bahwa lelaki adalah pencari nafkah dan perempuan menjadi pengurus rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas perempuan dengan sungai untuk mencuci pakaian lebih tinggi dibandingkan laki-laki, perempuan 32% dan laki-laki 21 %. karena sungai juga merupakan sumber air bersih.

2. Aktifitas Masyarakat Berkaitan dengan Hutan

Aktifitas terbesar 304 responden terkait dengan hutan, adalah mencari kayu untuk memasak. Selain itu hutan juga menjadi sumber makanan nabati, .hutan juga digunakan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat, khususnya yang tinggal berdekatan dengan sungai.

Bagi Perempuan hutan adalah sumber kebutuhan utama untuk memasak, khususnya mencari kayu bakar. Sedangkan bagi laki-laki hutan menjadi sumber makanan. Sebagian kecil perempuan menjadikan hutan sebagai sumber penghasilan, khususnya mencari kayu bakar untuk dijual. Untuk melihat bagaimana aktivitas masyarakat di lokasi penelitian dapat dilihat dalam matrik berikut ini. Bagi masyarakat yang tidak tinggal berdekatan dengan hutan, secara umum tidak memanfaatkan hutan bagi Kehidupan sehari-hari.

Tabel:3.1
Aktivitas Masyarakat dengan Hutan Berdasarkan Jenis Kelamin

Aktivitas dengan Hutan	Jenis Kelamin (166 Laki-laki & 138 Perempuan)	
	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
Sumber Makanan Nabati	11	8,9
Mencari Kayu untuk Memasak	28	36
Sumber Penghasilan	1,5	3
Mencari Rezeki	1	0
Sumber Penghasilan Sawit	2,5	0,6
Sumber Penghasilan Kelapa	0	2,5
Sumber Penghasilan Jeruk	1	0,6
Sumber Penghasilan Jernang	7	2
Sumber Penghasilan Rotan	3	0,6
Sumber Penghasilan Kopi	4,5	1,3
Sumber Penghasilan Kemiri	0,5	1,3
Sumber Penghasilan Cabai	3	4
Sumber Penghasilan Kayu	0,5	0
Sumber Penghasilan Serai	0	2,5
Sumber Penghasilan Pinang	2	5
Sumber Penghasilan Padi	4	3
Sumber Penghasilan Mentimun	0	0,6
Sumber Penghasilan Rambutan	0	0,6

Sumber Penghasilan Pertanian	1	0
Sumber Penghasilan Perkebunan	9	7
Sumber Penghasilan Tanaman Obat	0,5	0
Sumber Penghasilan Temulawak	0,5	0
Pemanfaatan Kayu/Membuat Papan	0	1,3
Membabat Rumput	0	0,6
Berburu	1	0
Menangkap Burung	0,5	0
Kerja Kontrak per hari	0	0,6
Menembak	0,5	0
Panjat Kelapa	0,5	0
Tidak Ada	17	18

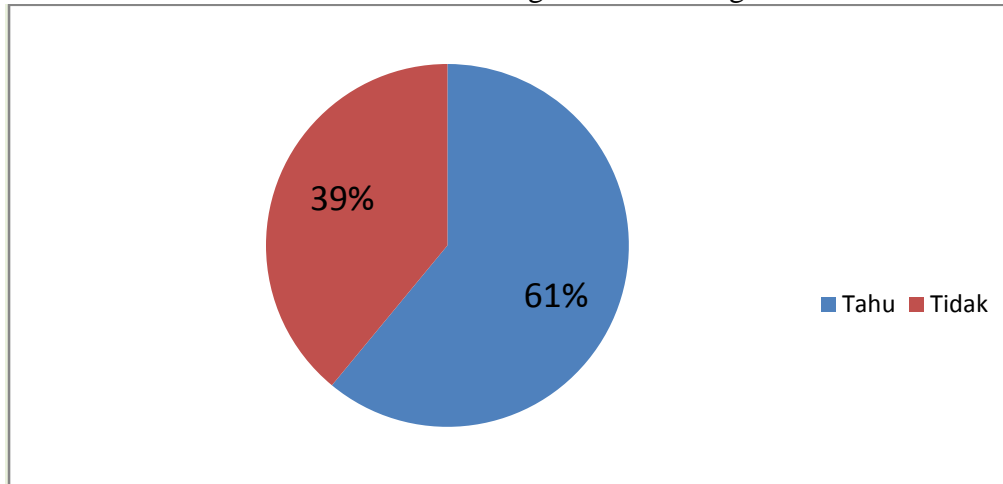
Ketergantungan masyarakat dengan hutan juga sangat besar, khususnya bagi masyarakat yang tinggal berdekatan dengan hutan. Mereka menggunakan hutan, sebagai sumber kayu bakar utama, mencari sumber makanan dan juga menjadi sumber penghasilan. Hutan juga dibuka untuk dijadikan kebun seperti kebun sawit, kebun serai wangi, kelapa dan tanaman yang lain.

BAB IV
PENGETAHUAN TENTANG PLTA PEUSANGAN

A. Pengetahuan Masyarakat tentang Pembangunan PLTA Peusangan

Dari 304 responden yang diwawancarai diketahui bahwa sebagian besar responden telah mengetahui akan dibangunnya PLTA Peusangan di Bener Meria. Untuk melihat pengetahuan ini, dapat dilihat dalam Matrik berikut:

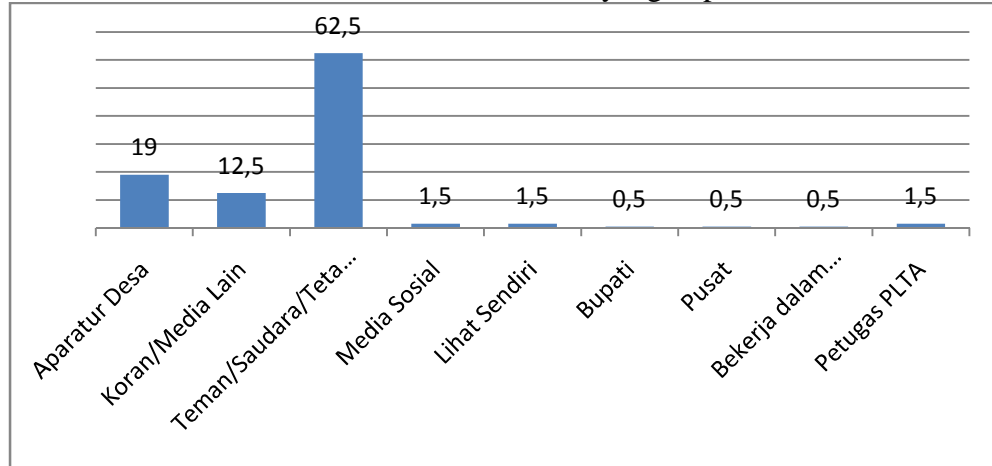
Gambar 4.1
Informasi PLTA Peusangan akan Dibangun



Dari Matrik di atas diketahui bahwa ada 61% dari 304 responden telah mengetahui tentang rencana pembangunan PLTA Peusangan dan 39% tidak mengetahui. Secara umum mereka mengetahui tentang rencana pembangunan tersebut dari berbagai pihak. Mengenai sumber informasi yang diperoleh oleh masyarakat dapat dilihat dari matrik di bawah ini.

Presentase Sumber informasi yang diperoleh oleh 61% responden tentang Pembangunan PLTA Peusangan adalah sebagai mana yang terlihat dari matrik berikut:

Gambar 4.2
Prosentase Sumber Informasi yang Diperoleh



Sebagian besar informasi tentang pembangunan PLTA yang diperoleh oleh responden adalah dari keluarga, saudara dan atau tetangga (62,5%). Selain itu informasi dari aparat desa 19% dan dari Koran/media lain 12,5%. Sementara itu yang memperoleh informasi dari media social hanya 1,5%. Secara umum masyarakat di desa sedikit sekali menggunakan media sosial sebagai sumber informasi, dibandingkan dengan masyarakat dipertanian. Sebagian lainnya mendapatkan informasi dari berbagai sumber lain, seperti melihat sendiri 1,5%, dari Bupati 0,5%, bekerja sebagai petugas atau mendapat informasi dari petugas PLTA Peusangan ada 2%.

Apabila dilihat dari jenis kelamin, maka pengetahuan 304 responden yang terdiri dari perempuan 138 orang dan laki-laki 166 orang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel: 4.1
Pengetahuan Responden dari Jenis Kelamin

Informasi PLTA V Peusangan akan Dibangun	JUMLAH		
	Org	Tahu (%)	Tidak Tahu (%)
Laki-laki	166	72	28
Perempuan	138	47	53

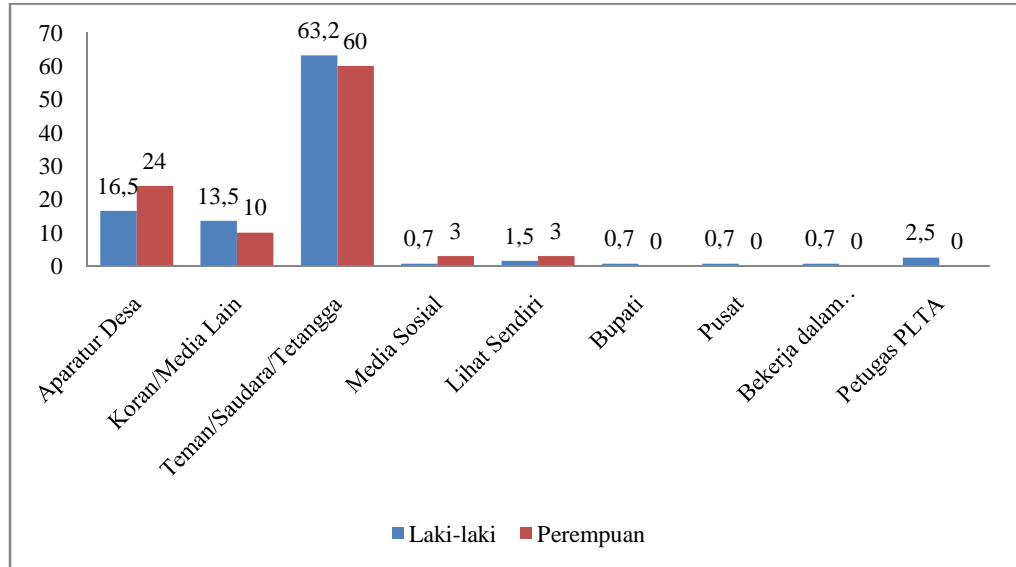
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, jumlah responden laki-laki yang mengetahui informasi tentang rencana pembangunan PLTA V Peusangan

jauh lebih banyak (72%) dari 166 total responden laki-laki, dibandingkan perempuan. Sementara itu jumlah Perempuan yang tidak mengetahui informasi jumlahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 53% dari 138 responden perempuan. Minimnya informasi yang diperoleh perempuan secara umum adalah perempuan tidak mempunyai akses pada informasi sebanyak laki-laki. Selain sebagian besar waktu perempuan dihabiskan untuk mengurus urusan domestik, perempuan juga tidak mempunyai banyak kesempatan untuk bergerak ke ruang publik, sebagaimana halnya laki-laki.

Dari 47% atau sekitar 34 dari 138 orang responden perempuan yang mengetahui tentang pembangunan PLTA, sebagian besar (60%) mengetahuinya dari keluarga, saudara atau tetangga. Selebihnya dari aparat desa 24% dan dari koran 10%, Selebihnya emnegtahui dari media sosial dan melihat sendiri pembangunannya, sekitar 6%.

Presentase Sumber informasi yang diperoleh oleh 304 responden perempuan (138 org) dan laki-laki (166 Org) tentang Pembangunan PLTA Peusangan berdasarkan jenis kelamin, hasilnya dapat lihat pada matrik berikut

Gambar 4.3
Sumber Informasi terkait Rencana Pembangunan PLTA V Peusangan Dilihat
dari Jenis Kelamin



Laki-laki maupun perempuan sebagian besar mendapat informasi dari keluarga, saudara atau tetangga (Perempuan 50%, dan laki-laki 63%). Tidak tersedia informasi yang baik dari pemerintah gampng atau pemerintah daerah terkait dengan informasi pembangunan PLTAV Peusangan. Informasi yang diterima secara tidak lengkap oleh masyarakat, dan bukan dari sumber yang dapat memberikan informasi dengan baik, kemungkinan akan berdampak pada penerimaan informs yang tidak sesuai. Hanya 24% dari 138 responden perempuan, dan 16,5% dari 166 responden laki-laki yang mendapat informasi dari aparaturnya desa, dan 10% responden perempuan dan 13,5% responden laki-laki yang mendapat informasi dari koran dan media lain.

Dilihat dari segi usia responden, maka dari 304 responden yang paling banyak mengetahui informasi adalah usia 31 sd 40 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel: 4.2
 Pengetahuan Masyarakat tentang Pembangunan PLTA Peusangan dari Usia

Usia	Jumlah (Org)	Tahu (%)	Tidak Tahu (%)
11-20 thn	32	69	31
21-30 thn	61	49	51
31-40 thn	91	65	35
41-50 thn	63	29	71
51-60 thn	33	55	45
61-70 thn	15	47	53
71-80 thn	8	37	63
81-90 thn	1	0	0
Total	304		

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden dengan rentang usia antara 11 sd 20 Tahun (69%), berikutnya usia 31 sd 40 tahun 65% adalah kelompok usia yang paling banyak mengetahui tentang rencana pembangunan PLTA V Peusangan. Kelompok usia yang paling sedikit mengetahui tentang rencana pembangunan PLTA V adalah kelompok usia 61 sd 70 tahun dan kelompok usia 81 sd 90 tahun. Kelompok muda dan kelompok dengan usia produktif adalah kelompok yang paling banyak mengetahui informasi. Hal ini disebabkan mobilitas mereka biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lain, baik di dalam desa maupun di luar desa.

Sumber informasi masyarakat apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel: 4.3
 Sumber informasi masyarakat tentang PLTA Peusangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

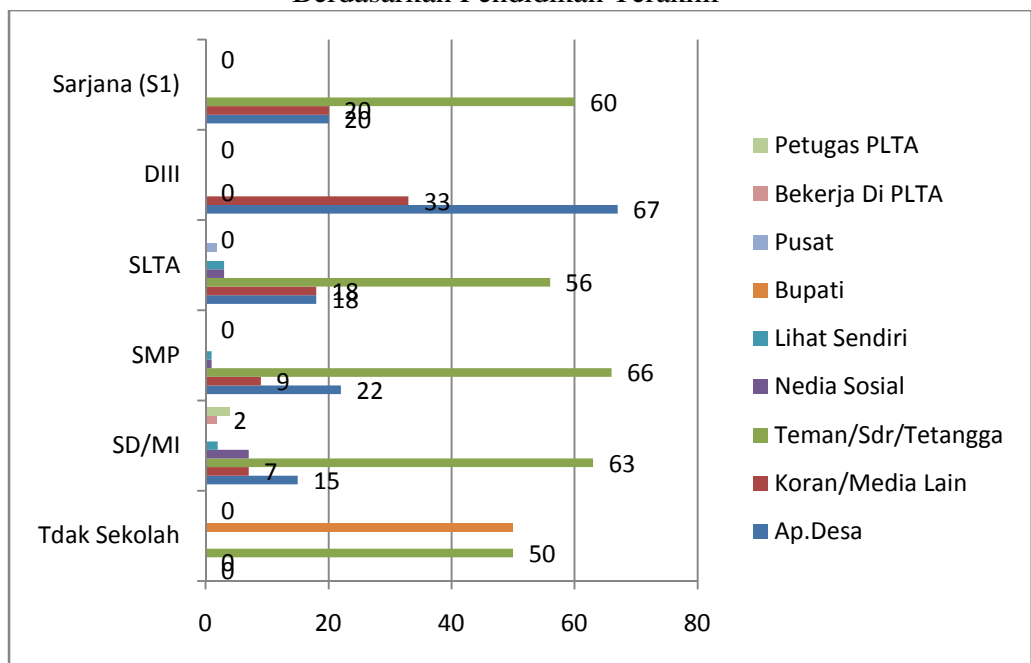
Pendidikan Terakhir	Jumlah	Tahu (%)	Tidak Tahu (%)
Tidak Sekolah	7	29	71
SD/MIN	92	50	50
SMP	93	72	28

SLTA	97	64	36
D-III	5	60	40
S1	9	56	44
Pesantren	1	0	100
Total	304		

Dari tabel di atas tergambar bahwa, responden yang tidak sekolah, hanya 29% yang mengetahui informasi terkait dengan perencanaan pembangunan PLTA. Sementara tingkat pendidikan yang paling banyak mengetahui informasi adalah tingkat Sekolah menengah pertama (SMP) dan menengah atas, baik SMA, SMK, atau STM yaitu antara 72% sampai dengan 64%. Sementara kelompok responden dengan pendidikan terakhir, SD, D3 dan S1 juga sebagian besar mengetahui informasi ini, yaitu antara 50 sd 60%.

Sumber informasi masyarakat berdasarkan jenis tingkat pendidikannya, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel: 4.4
Presentase Sumber Informasi Masyarakat tentang PLTA Peusangan Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sebagian besar dari 304 responden, mulai dari yang tidak sekolah sampai dengan Sarjana mendapat informasi dari saudara, teman atau tetangga. Sumber informasi dari responden yang tamat sekolah menengah Atas(SLTA) yang berjumlah 98 responden juga memperoleh informasi dari aparat desa (18%) dan media, seperti Koran 18%.

Presentase yang mengetahui informasi tentang Pembangunan PLTA Peusangan berdasarkan Pekerjaan dapat dilihat dalam matrik berikut ini:

Tabel: 4.5
Presentase Responden yang Mengetahui Informasi tentang Pembangunan PLTA Peusangan Berdasarkan Pekerjaan

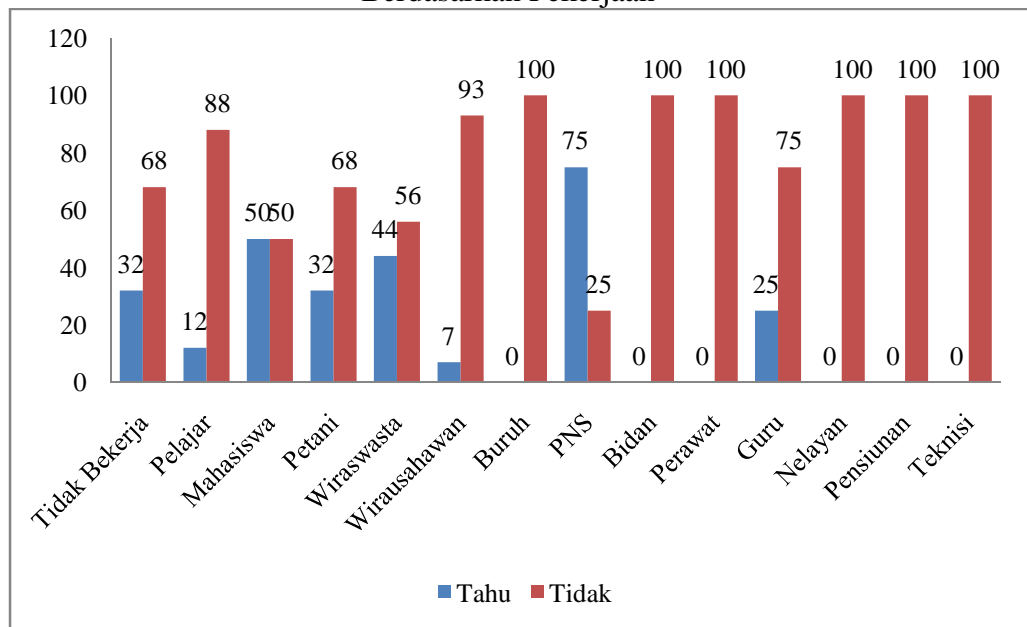
Pekerjaan	Jumlah	Tahu	Tidak
Tidak Bekerja	56	42	58
Pelajar	24	63	37
Mahasiswa	2	50	50
Petani	143	66	54
Wiraswasta	27	78	22
Wirausahawan	30	47	53
Buruh	8	63	37
PNS	4	100	0
Bidan/Perawat	2	0	100
Guru	4	50	50
Nelayan	2	0	100
Pensiunan	1	100	0
Teknisi	1	0	100
Total	304		

Dari 304 responden, yang paling banyak mengetahui informasi tentang Pembangunan PLTA V adalah PNS (100%) dari Pensiunan 100%, Wiraswasta 78%, petani 66 %, buruh 63%, pelajar 63% , guru dan mahasiswa masing-masing 50%.. Sementara itu responden yang bekerja di

sektor kesehatan seperti bidan dan perawat tidak satupun yang mengetahui informasi tentang pembangunan PLTA. Bidang kerja yang mereka geluti memang tidak bersentuhan dan tidak ada kaitannya dengan PLTA, sehingga mereka tidak tertarik dengan pembangunan PLTA.

Apabila dikaitkan antara pekerjaan dan sumber informasi yang diperoleh, maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel: 4.6
 Persentase Sumber informasi masyarakat tentang PLTA Peusangan Berdasarkan Pekerjaan



Jenis profesi dan pekerjaan tidak mempengaruhi sumber informasi yang diperoleh, karena sebagian besar adalah memperoleh informasi dari keluarga, teman atau tetangga. Guru 100% mendapat informasi tentang pembangunan PLTA dari Koran dari 50% responden dari PNS juga memperoleh informasi dari media lain seperti Koran. Hal ini dapat dipahami, karena akses guru dan PNS pada media seperti Koran, tentu lebih mudah, karena biasanya Koran akan tersedia di kantor-kantor pemerintah maupun di sekolah. Sedangkan responden lain, mendapatkan informasi dari aparat desa, dan beberapa sumber lain yang jumlahnya tidak signifikan.

B. Pengetahuan Masyarakat Tentang Kerugian Pembangunan PLTA

Pembangunan PLTA diharapkan akan dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan alam yang berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Tidak berada di dalam - atau secara signifikan berdampak buruk pada - kawasan bernilai konservasi tinggi
2. Mempertimbangkan berbagai alternatif penyediaan energi, sebelum memutuskan untuk membangun PLTA baru
3. Menerapkan prinsip-prinsip dan instrumen keberlanjutan serta menjalankan proses yang inklusif dan transparan dalam pembangunan dan pengelolaan PLTA, (WWF, dalam Pesentasi PLTA Berkelanjutan, Banda Aceh, Mei 2018)

Hal ini dilakukan karena dampak dari pembangunan PLTA bisa berdampak pada:

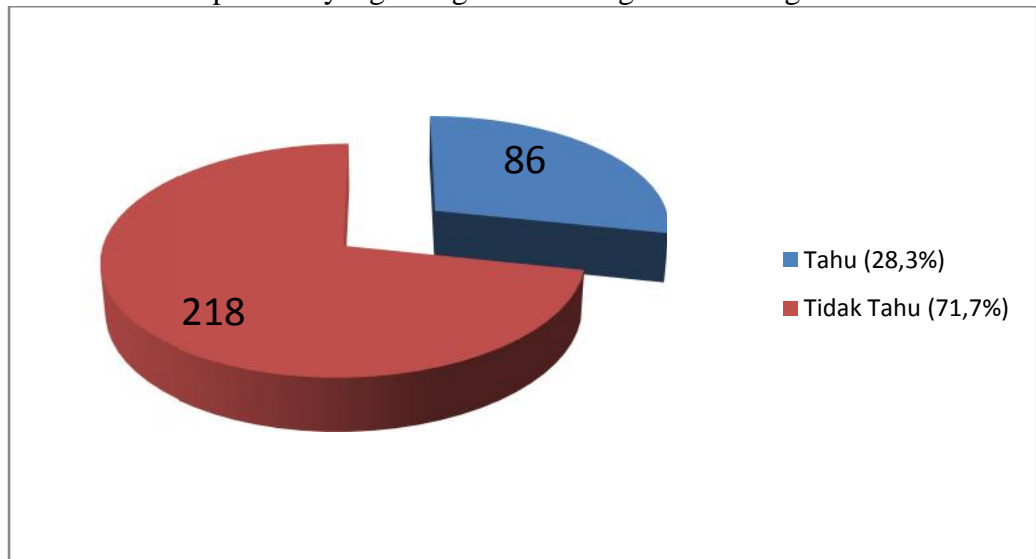
Hilangnya habitat spesies darat akibat penggenangan waduk;

2. Terganggunya keseimbangan ekosistem sungai akibat perubahan pola hidrologis alami dari aliran air sungai di daerah hilir;
3. Terganggunya migrasi ikan dan spesies air tawar lainnya;
4. Berkurangnya pasokan sedimen dan nutrisi akibat tertahan di bendungan mengganggu berbagai spesies di daerah hilir dan ekosistem hutan bakau di daerah muara;
5. Pembangunan PLTA membuka akses akan kawasan hutan sehingga rawan terhadap aktivitas penebangan pohon (WWF, dalam Pesentasi PLTA Berkelanjutan, Banda Aceh, Mei 2018)

Hal ini belum dipahami oleh masyarakat di sekitar DAS Peusangan, yang menjadi lokasi penelitian ini, Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam temuan ini bawah ini.

Sebagian besar responden di lokasi penelitian mengetahui tentang Rencana Pembangunan PLTA V Peusangan, akan tetapi tidak banyak responden yang mengetahui kerugian dari pembangunan PLTA bagi lingkungan, hutan, sungai maupun social. Untuk mengetahui tentang pengetahuan masyarakat tentang kerugian dari pembangunan PLTA dapat dilihat dari Matri berikut ini:

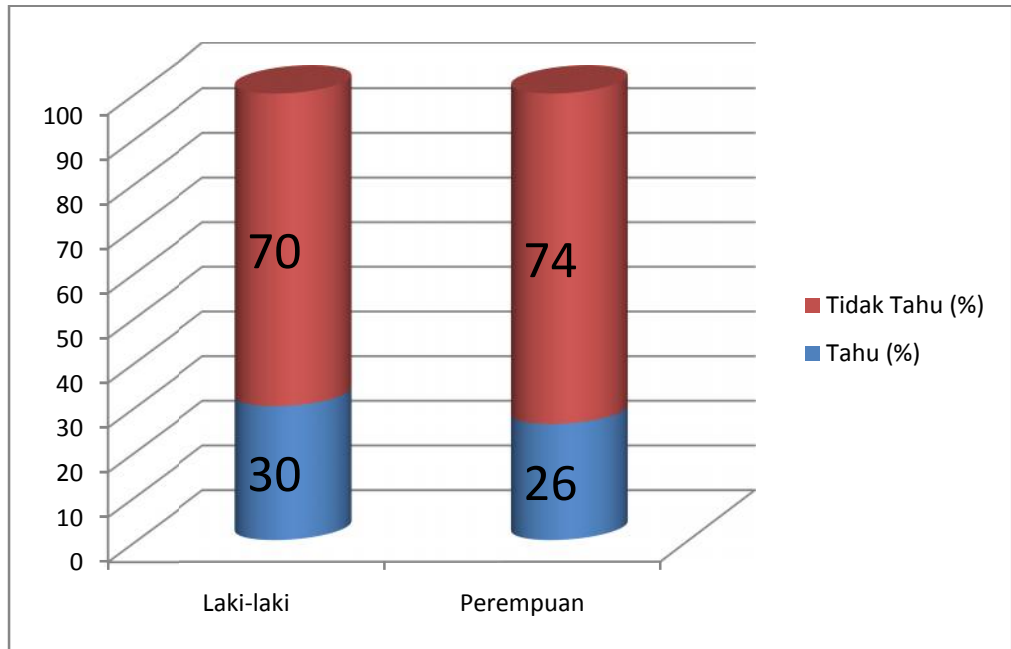
Gambar 4.4
Jumlah Respondent yang Mengetahui Kerugian Pembangunan PLTA



Dari matrik di atas diketahui hanya 86 orang atau (28, 3%) dari 304 respondern yang mengetahui mengenai kerugian dari pembangunan PLTA V Peusangan, dan 218 orang atau sekitar 71, 7% tidak mengetahui tentang kerugian dari pembangunan PLTA.

Pengetahuan ini tidak jauh berbeda antara laki-laki dan Perempuan. Untuk lebih jelas tentang pemahaman responden laki-laki dan perempuan terkait dengan kerugian pembangunan PLTA dapat dilihat dalam matrik berikut ini:

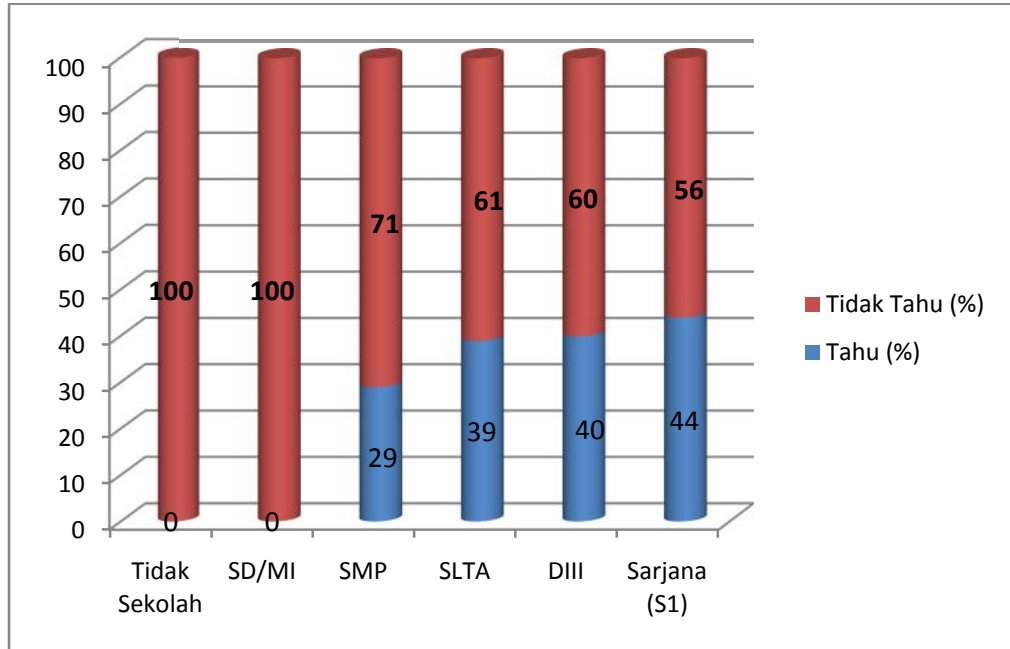
Gambar 4.5
Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Kerugian Pembangunan PLTA
berdasarkan Jenis Kelamin



Dari matrik di atas dapat dilihat bahwa, jumlah responden laki-laki yang tidak mengetahui jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang mengetahui. Responden yang mengetahui ada 30% laki-laki dan 26 % perempuan. Sementara yang tidak mengetahui terdiri dari 74% perempuan dan 70% laki-laki. Jumlah perempuan yang mengetahui lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, dan jumlah perempuan yang tidak mengetahui lebih banyak (74%) dibandingkan laki-laki. Hal ini tentu terjadi karena akses perempuan pada berbagai sumber informasi lebih sedikit dibandingkan laki-laki, walau untuk pengetahuan tentang kerugian ini jumlahnya tidak signifikan. Secara umum pengetahuan masyarakat tentang kerugian dari pembangunan PLTA sangat terbatas. Hal ini terjadi karena pemerintah maupun pihak lain yang concern untuk isu lingkungan tidak banyak memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak dari pengelolaan sumber daya alam bagi lingkungan dan bagi kehidupan masyarakat.

Apanila dilihat dari segi pendidikan terakhir, pengetahuan masyarakat tentang kerugian dari pembangunan PLTA V Peusangan maka dapat dilihat pada Matrik berikut berikut:

Gambar: 4.6
 Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Kerugian Pembangunan PLTA berdasarkan Pendidikan Terakhir

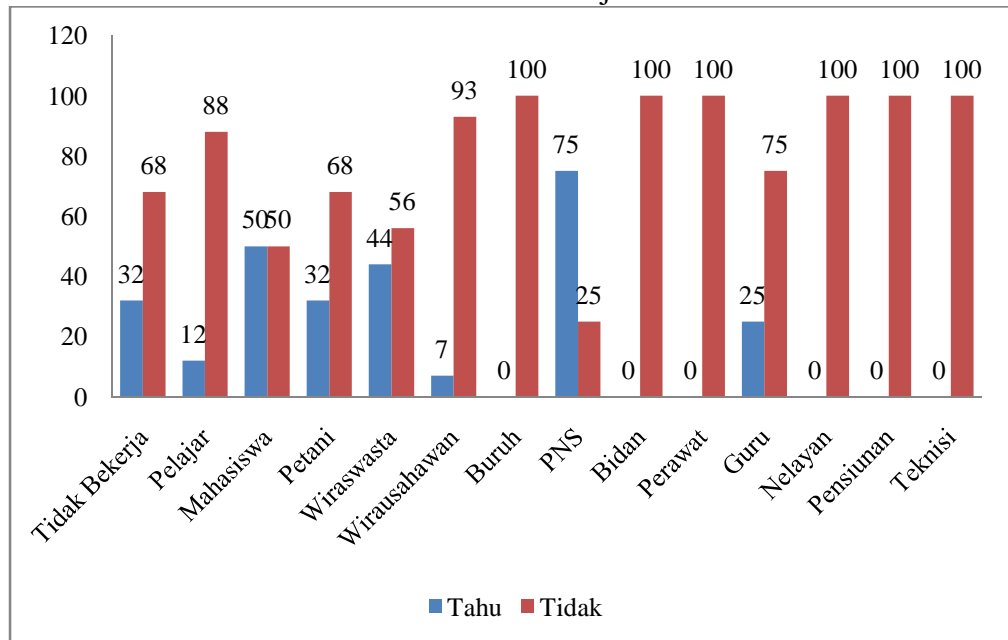


Dari matrik di atas, dapat tergambar, bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui kerugian dan pembangunan PLTA. Yang tidak sekolah dan tamatan SD, 100% tidak mengetahui kerugian dari pembangunan PLTA, tamatan SMP 71% , tamatan SMA 61%, tamatan D III, 60% dan tamatan Sarjana 56%. Angka ini memperlihatkan bahwa pendidikan tidak signifikan mempengaruhi pengetahuan tentang kerugian dari pembangunan PLTA, karena informasi seperti ini, memang hamper tidak diperoleh di sekolah formal, kecuali di beberapa pendidikan khusus. Sosialisasi tentang lingkungan hidup, juga termasuk jarang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait dengan informasi ini, sehingga pengetahuan masyarakat tentang isu lingkungan sangat sedikit, termasuk tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Kelompok pendidikan D3 dan S1 lebih dari 40%

mengetahu tentang kerugian PLTA, walau sebagian besarnya tidak mengetahui. Tingkat pendidikan sedikit banyak mempengaruhi tentang pengetahuan terhadap isu tertentu, walaupun sangat sedikit yang mngetahui tentang isu lingkungan.

Dalam hal dikaitkan pengetahuan masyarakat tentang kerugian PLTA dikaitkan dengan pekerjaan dapat dilihat matrik berikut ini:

Gambar: 4.7
 Persentase Pengetahuan Masyarakat Tentang Kerugian Pembangunan PLTA Berdasarkan Pekerjaan



Dari matrik di atas dapat dilihat bahwa pengetahuan 304 responden terkait dengan kerugian dari pembangunan PLTA apabila dilihat dari segi pekerjaannya, maka PNS adalah kelompok yang paling banyak mengetahui tentang kerugian dari pembangunan PLTA (75%), kemudian mahasiswa 50%, Wiraswasta 44%, Petani 32%. dan guru 25%. Profesi lain seperti nelayan, Pensiunan, buru, bidan, perawat dan teknisi sama sekali tidak mengetahui kerugian dari pembangunan PLTA. 32% orang yang tidak bekerja malah 32% mengetahui kerugian dari pembangunan PLTA.

Apabila dikaitkan pengetahuan masyarakat dibandingkan dengan pengetahuan tokoh masyarakat dan aparatur desa terkait dengan kerugian pembangunan PLTA dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel: 4.7
 Pengetahuan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat tentang Kerugian Pembangunan PLTA

Perangkat Desa	Pengetahuan Tokoh Masyarakat tentang Kerugian Pembangunan PLTA	
	Tahu	Tidak Tahu
Keuchik/Reje (%)	20	80
Sekretaris Desa (%)	0	100
Kepala Dusun (%)	50	50
Tuha 4 (%)	0	100
Tuha 8 (%)	25	75
Ketua Pemuda (%)	0	100
Wakil Ketua Pemuda (%)	0	100
Sekretaris kepemudaan (%)	100	0
BPK (%)	50	50
Imum Mukim (%)	100	0
Masyarakat (%)	28	72

Dari table di atas diketahui bahwa jumlah aparatur gampong yang mengetahui kerugian dari pembangunan PLTA jauh lebih besar, dibandingkan dengan masyarakat, namun demikian tidak semua aparatur desa mempunyai pengetahuan yang sama tentang kerugian dari pembangunan PLTA. Aparatur desa yang paling banyak mengetahui kerugian yang ditimbulkan adalah Sekretaris kepemudaan dan Imuem Mukim (100%), Kepala Dusun dan BPK 50%, Tuha 8 . 25% dan keuchik/reje, 20%.. Sementara sekretaris desa, ketua pemuda, wakil ketua pemuda 100% tidak mengetahui kerugian dari pembangunan PLTA. Sementara itu dari masyarakat hanya 28 % yang mengetahui kerugian dari pembangunan PLTA, dan 72% tidak mengetahui

kerugiannya. Pengetahuan dari aparat desa, tentu saja akan berpengaruh pada pengetahuan masyarakat. Apabila hanya 20% keuchk yang menetahui, dan tidak ada sekretaris desa dan tuha peut yang mengetahui, maka kemungkinan besar masyarakat tentu juga tidak akan mengetahui. Karena aparat adalah sumber informasi yang penting bagi masyarakat.

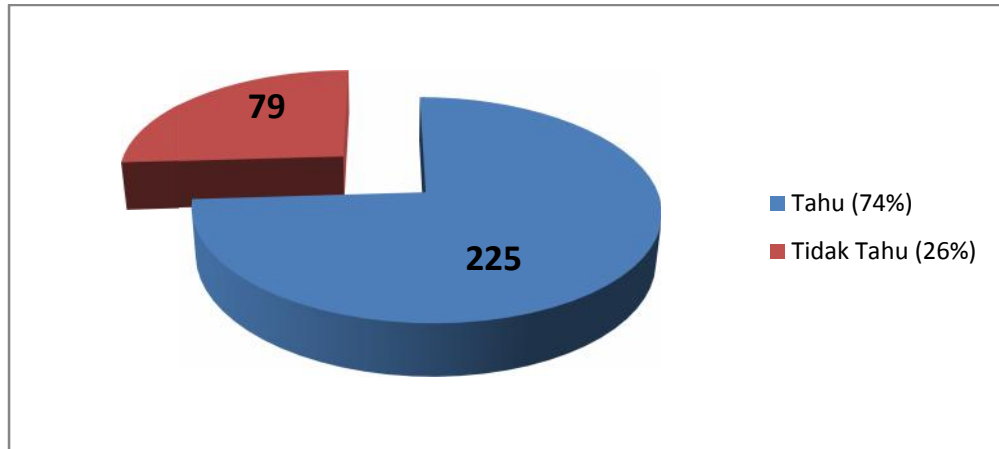
Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa beberapa kerugian dari pembangunan PLTA V Peusangan yang diketahui oleh masyarakat Bireuen diantaranya adalah:

- a. Adanya penebangan tanaman/pohon
- b. Adanya kerusakan lahan atau lingkungan,
- c. Tercemar air,
- d. Dapat mengurangi debit air,
- e. Mencemari sungai,
- f. Adanya radiasi bagi masyarakat,
- g. Mengganggu masyarakat sekitar,
- h. Mengganggu kesehatan masyarakat,
- i. Terjadi korupsi anggaran dan PLN,
- j. Roboh tower, yang bisa merugikan masyarakat

C. Pengetahuan Masyarakat Tentang Keuntungan Pembangunan PLTA

Pengetahuan responden tentang keuntungan pembangunan PLTA perlu juga dilihat dari penelitian ini. Pengetahuan tentang keuntungan akan mempengaruhi jawaban responden terkait dengan setuju atau tidak setuju untuk pembangunan PLTA. Presentasi pengetahuan masyarakat terkait dengan keuntungan PLTA dapat dilihat dari matrik berikut.

Gambar : 4.8
 Pengetahuan Respondent tentang Keuntungan PLTA



Dari matrik di atas dapat terlihat bahwa pengetahuan masyarakat tentang keuntungan PLTA sangat besar. Sekitar 74% dari 304 responden atau 225 orang mengetahui tentang keuntungan pembangunan PLTA. Hanya 26% atau sekitar 79 orang dari 304 responden yang tidak mengetahui keuntungannya. Pengetahuan tentang keuntungan PLTA telah disampaikan dan disosialisasikan secara baik. Dalam materi pelajaran mulai dari SD sampai dengan SLTA pengetahuan tentang keuntungan PLTA telah disampaikan, sehingga pengetahuan tentang keuntungannya telah diketahui secara meluas oleh masyarakat.

Apabila dilihat pengetahuan masyarakat dari jenis kelamin, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini.

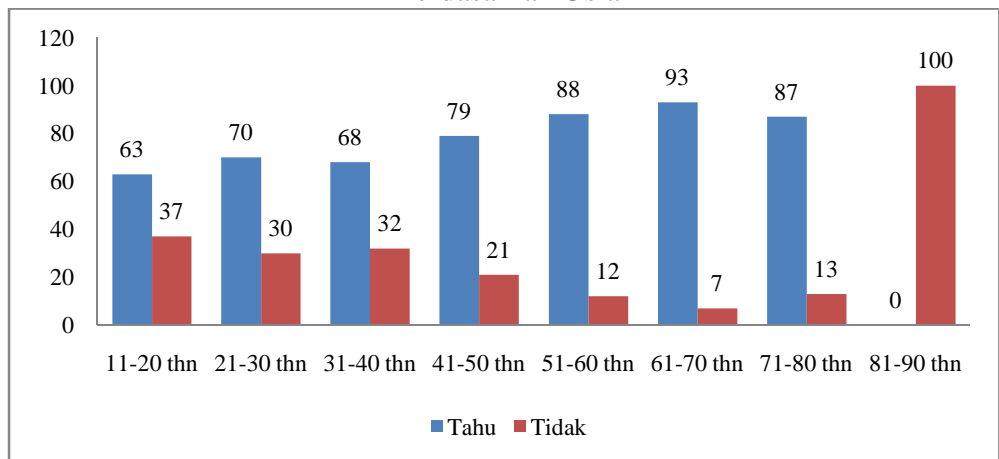
Tabel: 4.8
 Persentase Pengetahuan Responden tentang Keuntungan Pembangunan PLTA berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	JUMLAH	Pengetahuan Masyarakat Tentang Keuntungan Pembangunan PLTA	
	Org	Tahu (%)	Tidak Tahu (%)
Laki-laki	166	77	23
Perempuan	138	70	30

Jumlah laki-laki yang mengetahui keuntungan pembangunan PLTA lebih banyak (77%) dari total 166 orang dibandingkan dengan jumlah perempuan yang mengetahui (70%). Hal ini terjadi juga karena akses perempuan pada berbagai sumber informasi lebih terbatas. Perempuan banyak menghabiskan waktunya untuk urusan domestik dan laki-laki lebih banyak berinteraksi dengan berbagai pihak yang mempunyai sumber informasi. Untuk masyarakat desa, kerentanan laki-laki dan perempuannya memang hampir sama, walaupun demikian kerentanan perempuan biasanya lebih besar.

Apabila dilihat dari segi usia maka pengetahuan masyarakat tentang keuntungan dari pembangunan PLTA dapat dilihat dari matriks di bawah ini.

Gambar: 4.9
Pengetahuan Masyarakat Tentang Keuntungan Pembangunan PLTA Berdasarkan Usia



Rentang usia yang paling banyak mengetahui tentang keuntungan pembangunan PLTA adalah di rentang usia 61 sd 70 tahun (93%), diikuti usia 51 sd 60 tahun (88%), Usia 71 sd 80 tahun 87%, Usia 41 sd 50 tahun 79%, 31 sd 40 tahun 68%, Usia 21 sd 30 tahun 70%. Dibandingkan dengan pengetahuan

masyarakat terkait dengan pengetahuan masyarakat tentang kerugian dari pembangunan PLTA, pengetahuan tentang keuntungan PLTA jauh lebih tinggi.

Apabila dilihat pengetahuan masyarakat tentang keuntungan pembangunan PLTA dari segi pekerjaan responden, maka dapat dilihat sbb:

Tabel: 4.9
Pengetahuan Masyarakat Tentang Keuntungan Pembangunan PLTA berdasarkan Pekerjaan

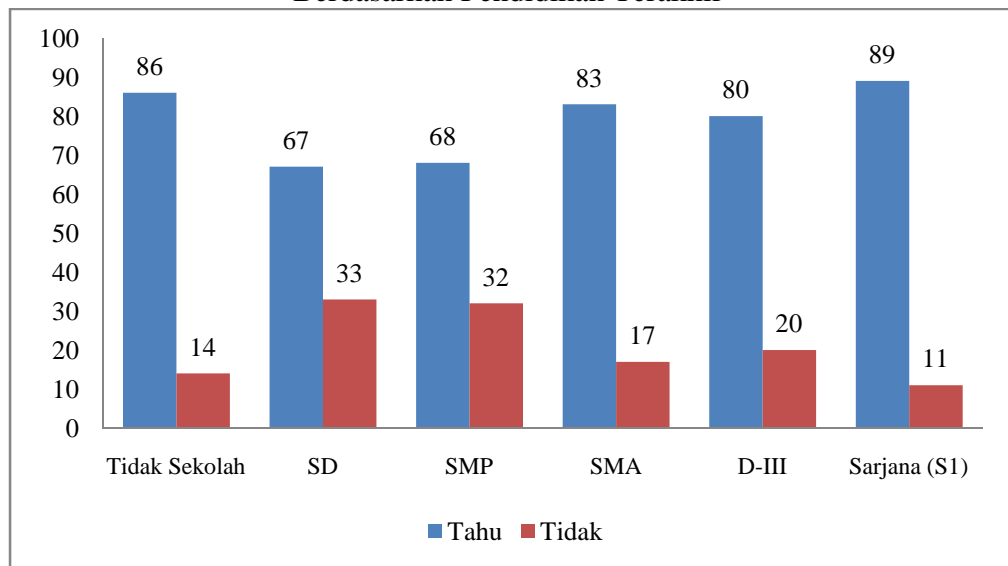
Pendidikan Terakhir	Jumlah	Pengetahuan Masyarakat Tentang Keuntungan Pembangunan PLTA	
	Orang	Tahu	Tidak
Tidak Bekerja (%)	56	73	27
Pelajar (%)	24	58	42
Mahasiswa (%)	2	100	0
Petani (%)	143	73	27
Wiraswasta (%)	27	78	22
Wirausahawan (%)	30	77	23
Buruh (%)	8	100	0
PNS (%)	4	100	0
Bidan/Perawat (%)	2	100	0
Guru (%)	4	50	50
Nelayan (%)	2	100	0
Pensiunan (%)	1	100	0
Teknisi (%)	1	0	100

Jumlah responden yang mengetahui keuntungan dari pembangunan PLTA dilihat dari segi jenis pekerjaan sangat tinggi antara 50% terendah sampai dengan 100% tertinggi. Jumlah yang tidak mengetahui yang tertinggi adalah guru (50%), diikuti oleh pelajar (42%). Pengetahuan guru yang rendah tentang ini, tentu saja akan berdampak pada pengetahuan muridnya sebagai pelajar. Kegunaan PLTA tentu akan dikaitkan dengan kebutuhan listrik

masyarakat. Listrik merupakan kenutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Jadi apabila ditanyakan tentang keuntungan PLTA, tentu saja jawabannya adalah keuntungan listrik.

Dilihat dari tingkat pendidikan terakhir, maka pengetahuan responden tentang keuntungan dari pembangunan PLTA dapat dilihat dari matrik berikut ini,

Gambar: 4.10
Persentase Pengetahuan Responden tentang Keuntungan Pembangunan PLTA Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Dari matrik di atas dapat dilihat bahwa keuntungan dari pembangunan PLTA diketahui oleh berbagai pihak dan tidak tergantung pada pendidikannya. Mulai dari yang tidak bersekolah sampai kepada yang berpendidikan S1 mengetahui manfaat dari pembangunan PLTA, khususnya manfaat sebagai pembangkit tenaga listrik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik yang selama ini dirasakan oleh masyarakat sebagai kebutuhan yang sangat penting, akan tetapi belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Pengetahuan tokoh masyarakat dan masyarakat tentang keuntungan pembangunan PLTA dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel: 4.10
 Persentase Pengetahuan Tokoh Masyarakat dan masyarakat biasa Tentang
 Keuntungan Pembangunan PLTA

Perangkat Desa	Pengetahuan Tentang Keuntungan Pembangunan PLTA	
	Tahu	Tidak
Geuchik (%)	100	0
Sekretaris Desa (%)	50	50
Kepala Dusun (%)	50	50
Tuha 4 (%)	100	0
Tuha 8 (%)	100	0
Ketua Pemuda (%)	100	0
Wakil Ketua Pemuda (%)	100	0
Sekretaris Ketua Pemuda (%)	100	0
BPK (%)	50	50
Imum Mukim (%)	100	0
Masyarakat (%)	73	27

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hampir 100% aparat desa mengetahui tentang keuntungan dari pembangunan PLTA. Hanya pengetahuan dari Sekretaris desa dan BPK yang 50%. Hal ini beimbang dengan pengetahuan masyarakat yang juga lebih dari 70% (73%) mengetahui tentang keuntungan dari PLTA.

Berdasarkan analisis data diperoleh data bahwa beberapa keuntungan dari pembangunan PLTA V Peusangan yang diketahui oleh masyarakat diantaranya adalah:

- a. Adanya sumber listrik sendiri sehingga tidak bergantung dari Pembangkit Medan,

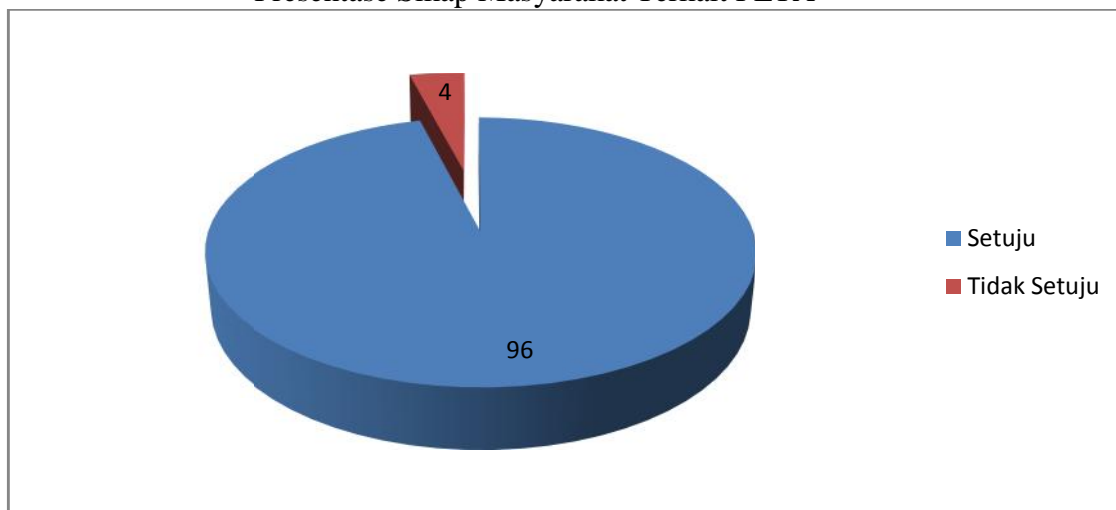
- b. Penambahan tenaga listrik sehingga seluruh pelosok memiliki listrik,
- c. Membantu masyarakat,
- d. Menerangi desa
- e. Mengurangi pemadaman listrik,
- f. Menambah/meningkat perekonomian,
- g. Adanya keuntungan bagi masyarakat yang lahannya dibebaskan untuk pembangunan PLTA

Pengetahuan seperti ini tentu saja pengetahuan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, karena informasi ini secara umum, memang bukan informasi yang sulit diperoleh. Jadi apabila dilihat dari jawaban responden terkait dengan keuntungan dari pembangunan PLTA, maka dapat disebutkan bahwa, sebagian besar masyarakat mengetahui keuntungan dari pembangunan PLTA.

BAB V SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN

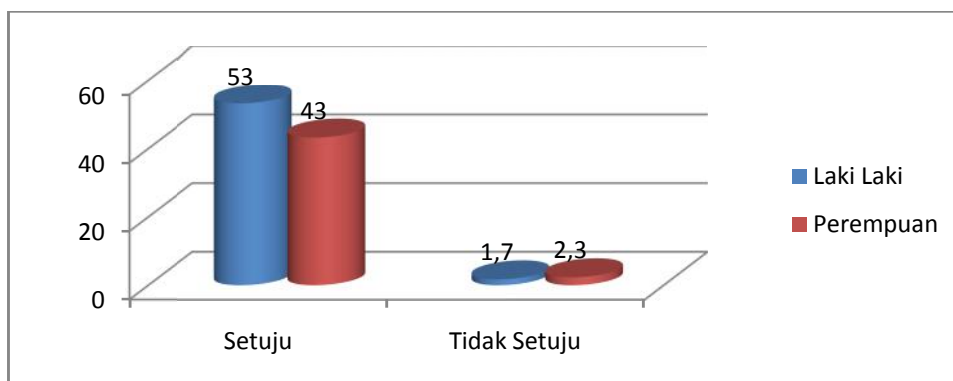
Hasil jajak pendapat berikut mengetengahkan Persentase Sikap masyarakat terhadap pembangunan PLTA Peusangan. Dari 304 respondent yang diteliti 96 % menyatakan setuju dengan pembangunan PLTA ini. Hanya 4% yang tidak setuju dengan pembangunan ini.

Gambar 5.1
Presentase Sikap Masyarakat Terkait PLTA



Untuk lebih memahami sikap masyarakat ini, berikut diketengahkan gambar persentasi sikap masyarakat yang dipilah berdasarkan jenis kelamin.

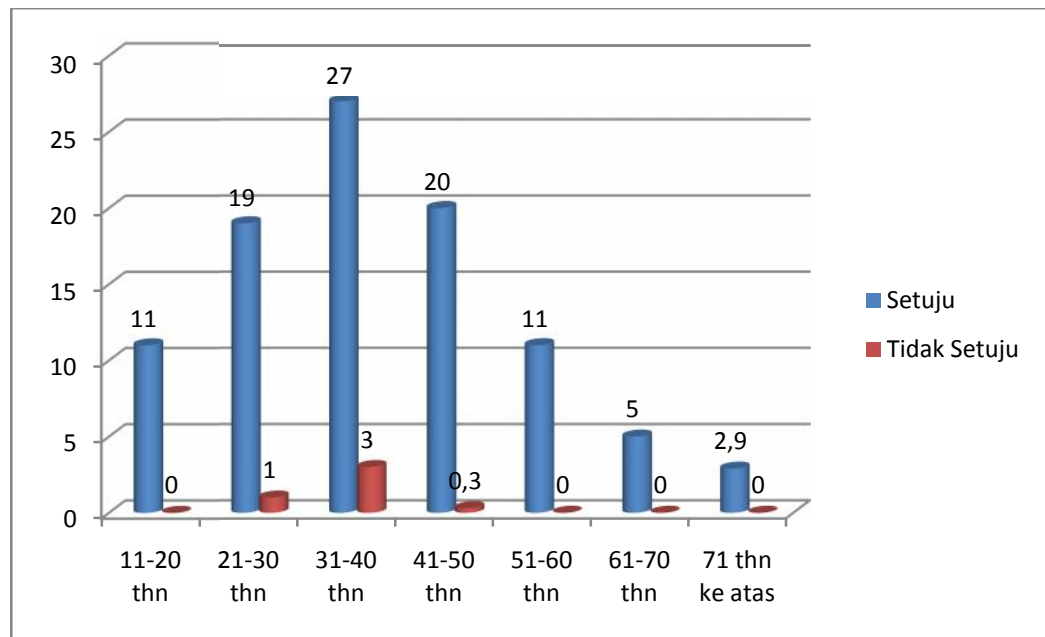
Gambar 5.2
Sikap Masyarakat Terhadap PLTA berdasarkan Jenis Kelamin



Dari 96% masyarakat yang menyatakan setuju dengan pembangunan PLTA, 53 % diantaranya adalah laki-laki dan 43% perempuan. Sementara yang tidak setuju 4 % dengan rincian 2.3% nya perempuan dan 1.7% laki-laki. Dapat disebutkan sebagian besar dari masyarakat yang tidak setuju adalah perempuan. Kenyataan ini menjadi menarik mengingat mainstream pendapat masyarakat adalah setuju, tetapi ada sekelompok kecil (kebanyakan perempuan) menolak pendapat mainstream di masyarakat ini.

Lebih spesifik, gambar berikut menerangkan tentang sikap masyarakat berdasarkan usia

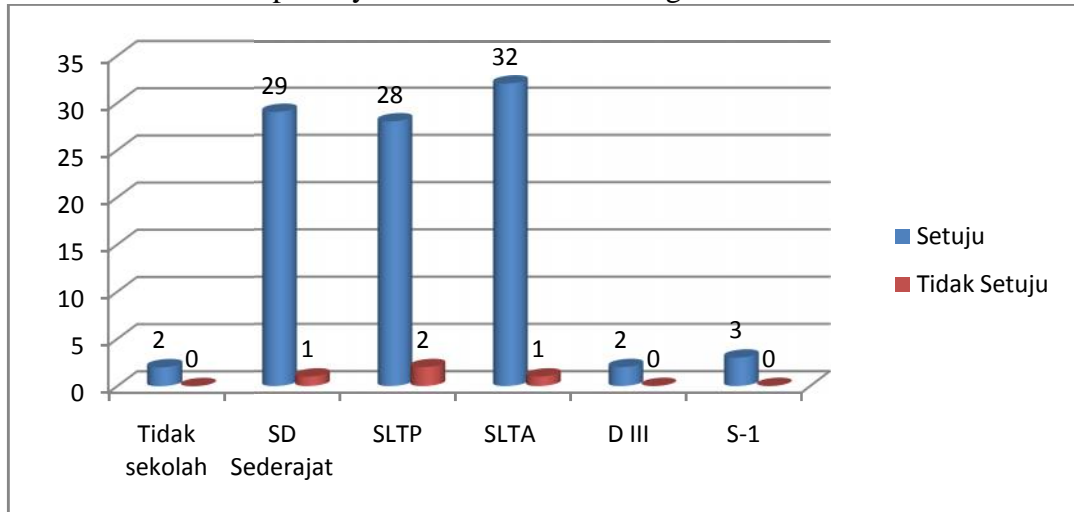
Gambar.5.3
Sikap Masyarakat Berdasarkan Rentang Usia



Berdasarkan usia, maka responden yang tidak setuju adalah responden yang berusia 21 -50 tahun, sementara responden dari kalangan anak-anak dan remaja semuanya menyatakan setuju. Demikian juga yang dari kalangan lansia, semua menyatakan setuju.

Gambar selanjutnya adalah persentase jumlah respondent yang menyatakan setuju dan tidak setuju, dilihat dari latar pendidikan.

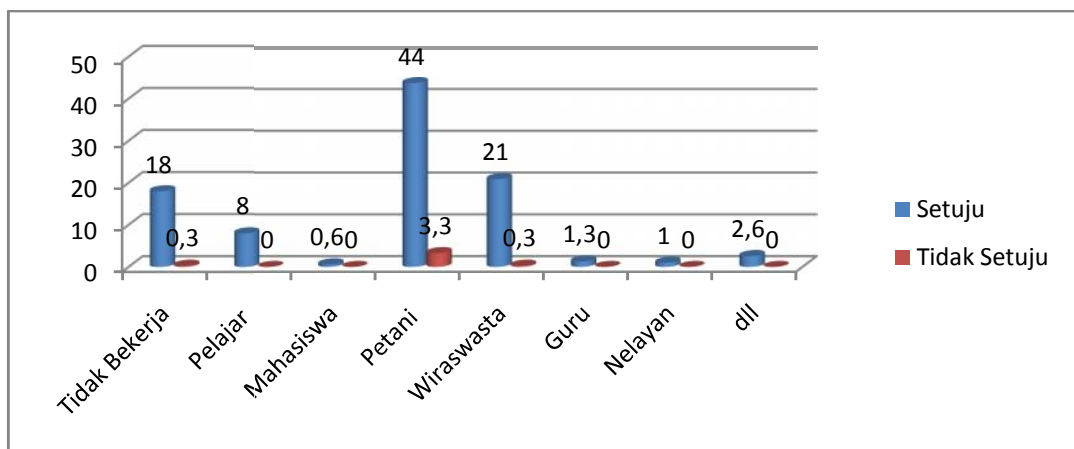
Gambar 5.4
Sikap Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Dari gambar 5.4 diketahui bahwa respondet yang tidak sekolah, DIII dan S1 semua menyetujui pembangunan PLTA. Hanya sebagian kecil respondet yang tidak setuju, dan tingkat pendidikannya SD, SLTP dan SLTA.

Jika dilihat persentase sikap masyarakat terhadap pembangunan PLTA Peusangan berdasarkan pekerjaan, maka diketahui sebagian besar respondet bekerja sebagai petani dan wiraswasta. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5.5
Sikap Masyarakat Berdasarkan Pekerjaan

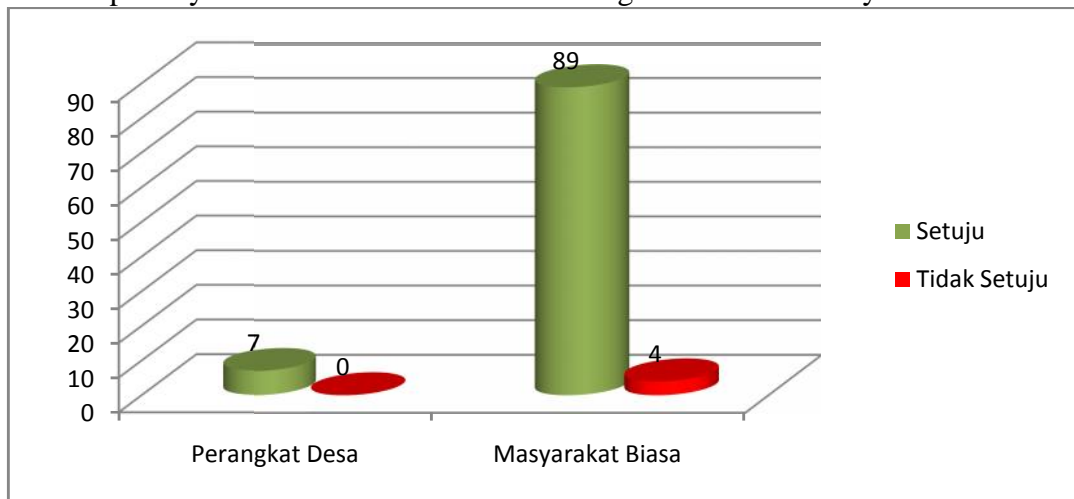


Gambar 5.5 menjelaskan bahwa: diantara masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan PLTA adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani, wirawasta dan yang tidak bekerja. Sementara pelajar, mahasiswa, guru, nelayan, dll semuanya setuju dengan pembangunan ini.

Selanjutnya jika ditelusuri dari sisi jenis kelamin, usia, pekerjaan dan pendidikan, maka diketahui bahwa 4 % masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan PLTA Peusangan, sebagian besarnya adalah perempuan dalam rentang usia 21-50 tahun, berpendidikan SD s/d SLTA dan berprofesi umumnya petani, ada juga yang wiraswasta dan tidak bekerja.

Selanjutnya perlu juga diketahui, bagaimana sikap perangkat gampong terkait pembangunan PLTA, mengingat sikap perangkat gampong merupakan rujukan penting bagi sebagian masyarakat. Berikut merupakan persentase sikap perangkat desa dibandingkan dengan masyarakat biasa.

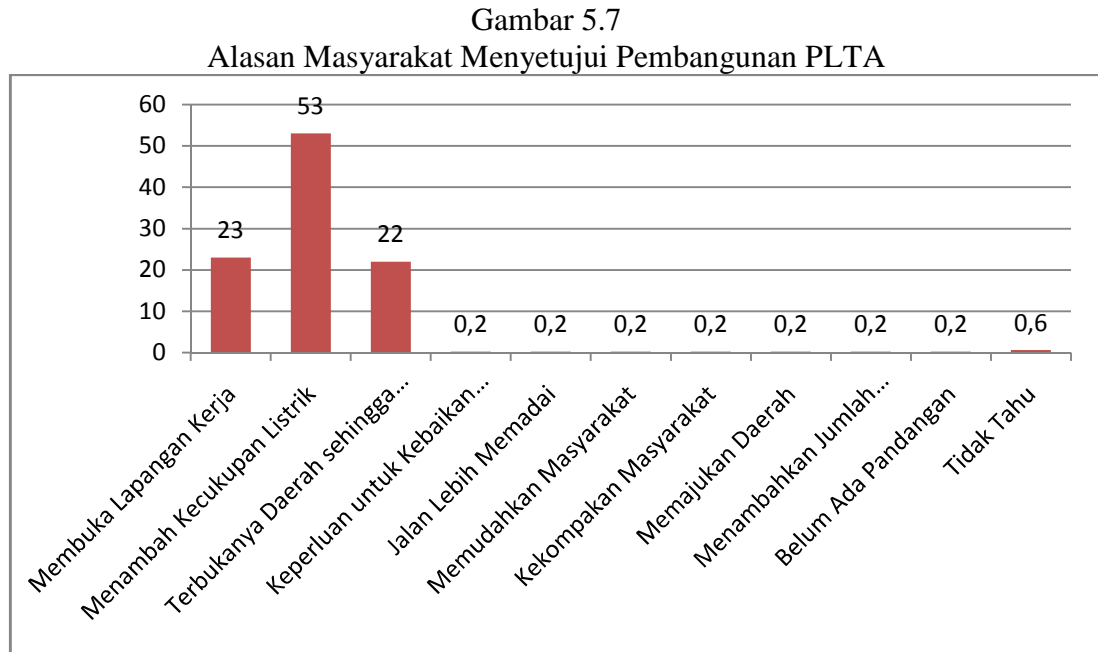
Gambar 5.6
Sikap Masyarakat Berdasarkan Status Perangkat Desa dan Masyarakat Biasa



Dari 21 orang perangkat desa yang ditemui, keseluruhannya setuju dengan pembangunan PLTA Peusangan. Perangkat desa yang menjadi respondent terdiri dari geuchik, sekretaris desa, ketua pemuda, dan tuha peut dari desa yang berada diseputaran wilayah yang akan menjadi lokasi pembangunan PLTA dan sepanjang DAS Peusangan. Mengingat masyarakat banyak yang mendapatkan informasi dari perangkat gampong maka dapat dipastikan informasi yang mengarahkan untuk setuju lebih besar porsinya dibanding yang mengajak untuk kritis. Apa lagi pada

Bab IV telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat memperoleh informasi melalui saudara/tetangga/ teman, lalu perangkat gampong dan media.

Gambar berikut ini akan menunjukkan apa saja alasan respondent menyetujui pembangunan PLTA.



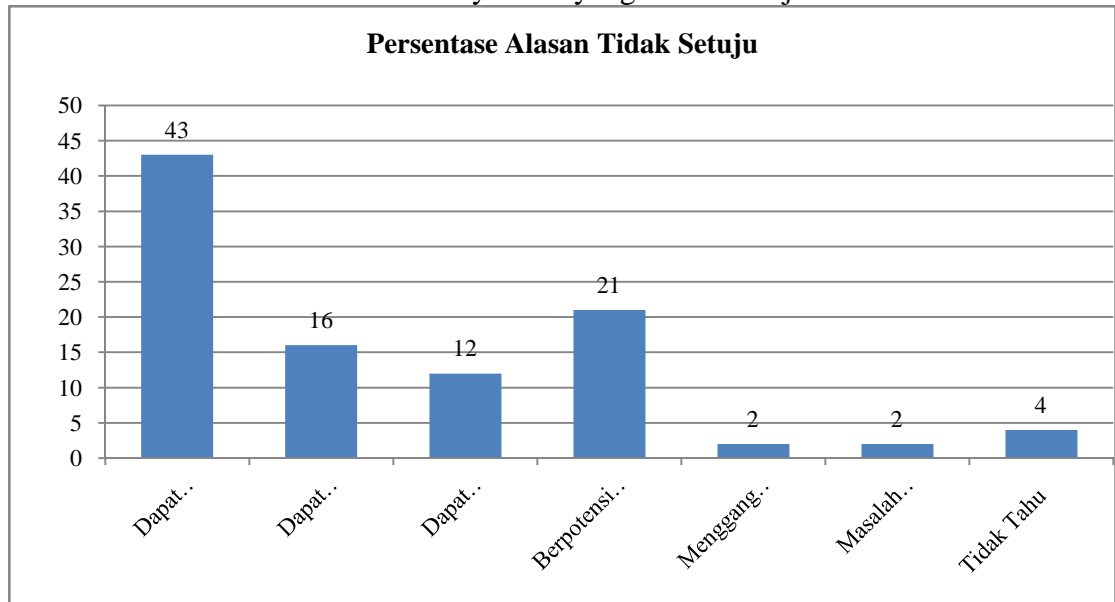
Alasan terbanyak masyarakat menyetujui pembangunan PLTA adalah untuk menambah kecukupan listrik. Hal ini dilatari situasi masyarakat yang sering mengalami pemadaman karena ketidak cukupan arus listrik. Sehingga harapan keluar dari situasi ini dilekatkan pada pembangunan PLTA sebagai salah satu solusi. 53 % responden setuju dengan pembangunan PLTA dengan alasan menambah kecukupan listrik, 23 %nya berharap akan mendapatkan peluang kerja, dan 22 % setuju dengan harapan pembangunan PLTA ini akan membuat daerah mereka lebih terbuka berkembang. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan praktis masyarakat terhadap listrik merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Akan tetapi kebutuhan masyarakat jangka panjang yang terkait dengan keseimbangan lingkungan juga sangat penting dikedepankan. Sehingga diantara sekian banyak respondent yang setuju, terdapat 4 % yang tidak setuju dengan pembangunan PLTA. Alasan respondent tidak setuju dengan pembangunan PLTA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Alasan Responden Menjawab Tidak Setuju

Alasan Tidak Setuju	Responden	Persentase (%)
Dapat Merusak Kualitas Aliran Sungai	22	43
Dapat Mengganggu Kawasan Hutan	8	16
Dapat Mengganggu Habitat Satwa	6	12
Berpotensi Mengakibatkan Perelokasian Masyarakat	11	21
Mengganggu Perkebunan	1	2
Ganti rugi yag bermasalah	1	2
Tidak Tahu	2	4
Total	51	100

Alasan terbesar peserta yang tidak setuju pembangunan PLTA adalah karena dapat merusak kualitas air sungai (43%). Ketergantungan masyarakat terhadap sungai khususnya Peusangan sangat tinggi. Ada 11 aktifitas keseharian masyarakat yang terkait dengan sungai Peusangan. Sehingga kekhawatiran terbesar mereka dengan sungai ini juga berhubungan dengan kekhawatiran mereka terhadap menurunnya kualitas air bersih yang sebagian masyarkat mendapatkannya dari sungai Peusangan.

Gambar 5.8
Alasan Masyarakat yang Tidak Setuju



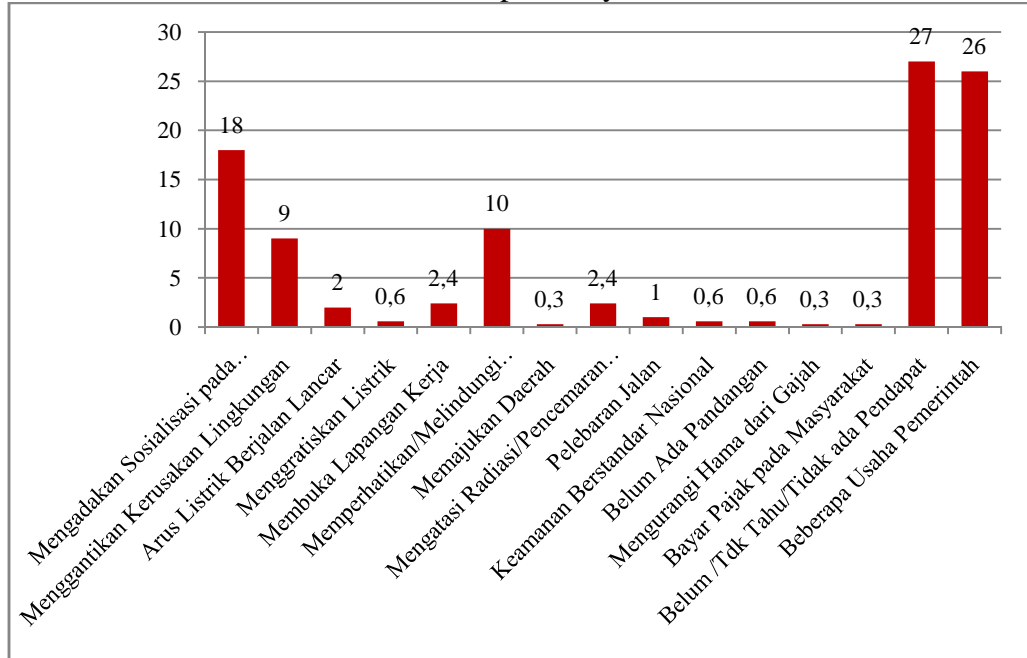
Persetujuan masyarakat merupakan gambaran keinginan mereka yang berangkat dari kebutuhan praktis. Sangat terbatas pengetahuan mereka untuk mempertimbangkan keseimbangan alam yang bisa saja terganggu karena pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Karenanya masyarakat menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah untuk melakukan beberapa hal, sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Harapan Masyarakat Terhadap Pemerintah Terkait PLTA Peusangan

N0	Pendapat Masyarakat terhadap Usaha Pemerintah dalam mengurangi dampak negatif dari Pembangunan PLTA	Responden	Persentase (%)
1	Mengadakan Sosialisasi pada Masyarakat	52	18
2	Menggantikan Kerusakan Lingkungan	27	9
3	Arus Listrik Berjalan Lancar	6	2
4	Menggratiskan Listrik	2	0,6
5	Membuka Lapangan Kerja	7	2,4
6	Memperhatikan/Melindungi Lingkungan Sekitar	28	10
7	Memajukan Daerah	1	0,3
8	Mengatasi Radiasi/Pencemaran Sungai atau Lingkungan	7	2,4
9	Pelebaran Jalan	3	1
10	Keamanan Berstandar nasional	2	0,6
11	Mengurangi Hama dari Gajah	1	0,3
12	Bayar pajak pada Masyarakat	1	0,3
14	Belum/ tidak Tahu/tidak ada pendapat	79	27
15	Pemerintah harus punya upaya nyata	76	26
	Total	292	100

Berikut gambaran dari tabel di atas

Gambar 5.9
Persentase Pendapat Masyarakat

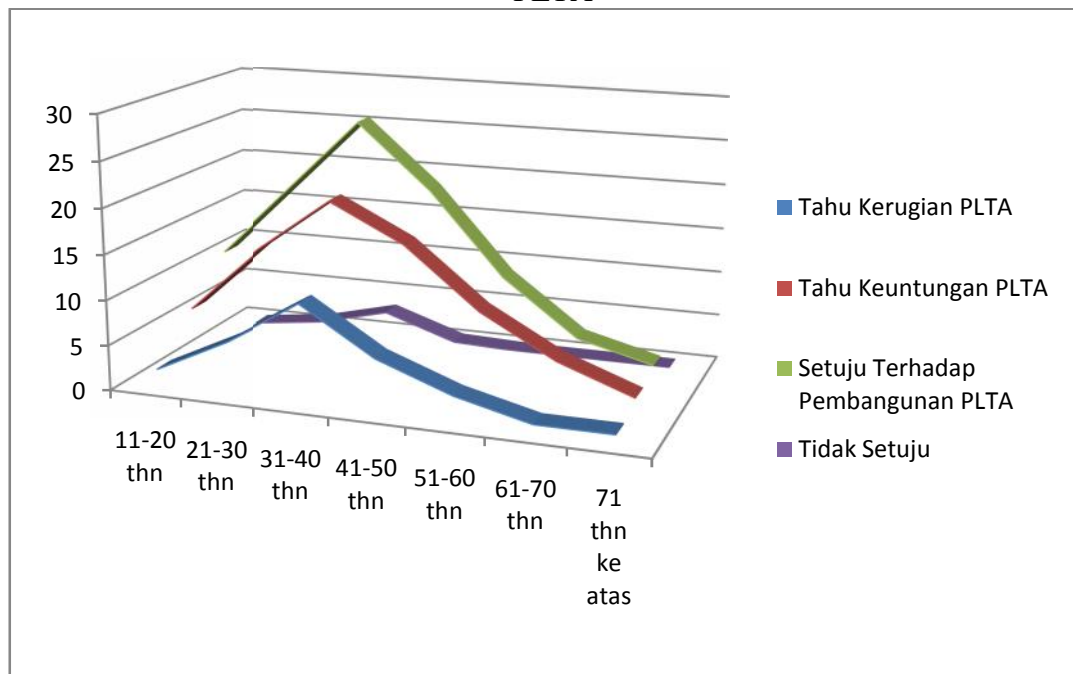


Meski 27 % dari respondent tidak tahu harus memberikan saran apa, 26 % lainnya mencoba memberi jawaban yang umum, bahwa yang penting pemerintah harus melakukan sesuatu, apapun itu yang penting bermanfaat. Karena ketidak tahuan ini pula, 18 % dari responden mengusulkan agar pemerintah melakukan sosialisasi ke masyarakat. Ada pula yang menyarankan agar pemerintah melindungi lingkungan sekitar PLTA, menggantikan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan PLTA, mengatasi terganggunya lingkungan sungai, memastikan terbukanya lapangan pekerjaan, memastikan arus listrik lancar (mencukupi), dll.

BAB VI KONDISI MASYARAKAT DAN SIKAPNYA TERKAIT PEMBANGUNAN PLTA

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu diketahui bahwa pengetahuan masyarakat tentang keuntungan dan kerugian keberadaan PLTA berkaitan dengan sikap persetujuan mereka terhadap pembangunan PLTA. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

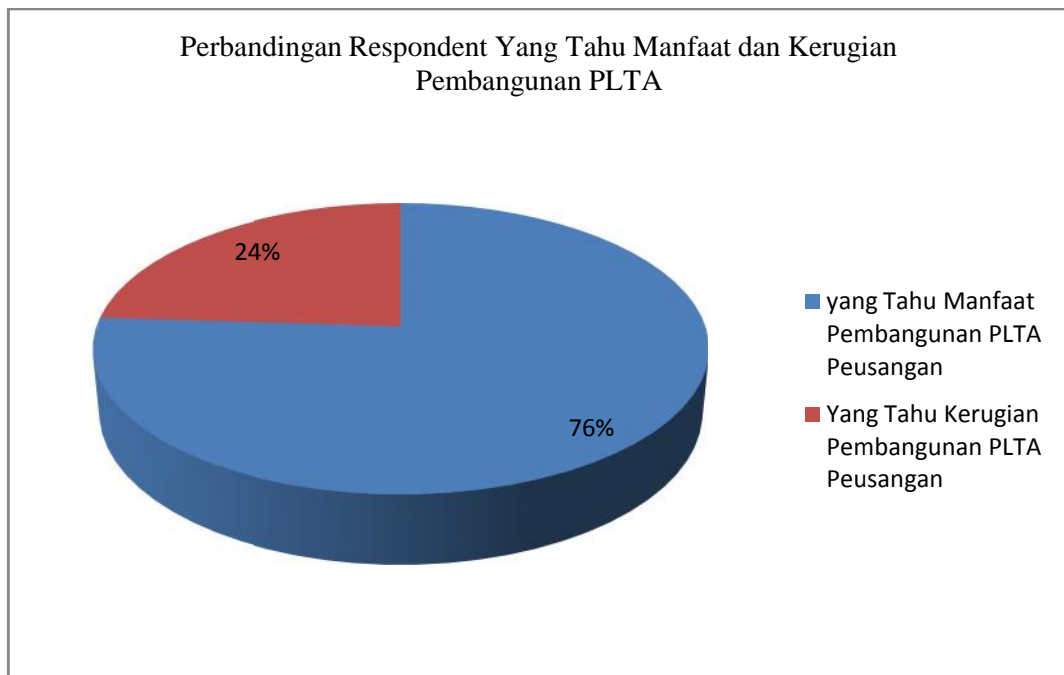
Gambar 6.1
Pengetahuan Tentang Manfaat-Kerugian dan Sikap Terhadap Pembangunan
PLTA



Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar respondent mengetahui manfaat pembangunan PLTA, hanya sedikit yang tahu kerugiannya. Pada grafik di atas tergambar bahwa sedikitnya jumlah masyarakat yang mengetahui kerugian pembangunan PLTA, senada dengan garis yang menunjukkan sedikit pula prosentase masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan PLTA. Sebaliknya banyak masyarakat yang mengetahui keuntungan PLTA ini juga senada dengan sikap masyarakat yang setuju terhadap pembangunan PLTA.

Selain itu, gambar 6.1 menunjukkan timpangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat, dimana konsentrasi pengetahuan masyarakat terpusat pada keuntungan praktis yang akan mereka dapatkan, dan abai pada kerugian bahkan bahaya yang akan menimpa mereka. Gambar berikut merupakan perbandingan prosentase masyarakat yang tahu keuntungan pembangunan PLTA dan yang tahu kerugiannya.

Gambar 6.2
Prosentase Respondent yang Tahu Manfaat dan Kerugian Pemb PLTA

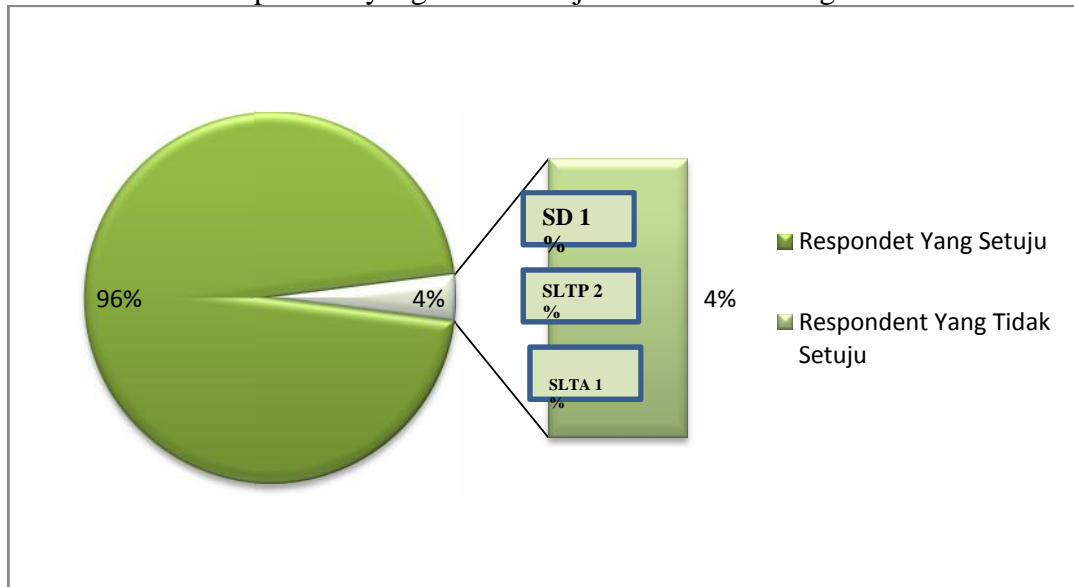


Gambar di atas menunjukkan bahwa hanya sedikit dari respondent yang mengetahui kerugian pembangunan PLTA. Data menunjukkan bahwa respondent yang tidak setuju dengan pembangunan PLTA ini adalah respondent yang mengetahui kerugiannya. Akan tetapi pengetahuan tentang kerugian ini bukanlah pengetahuan yang umum dan mudah didapatkan oleh respondent. Harus ada kegiatan yang disengaja dan mensasar hal ini supaya masyarakat mengetahuinya. Pengetahuan ini juga tidak terkait dengan tingkat pendidikan. Asumsi bahwa respondent yang berpendidikan S1 memiliki wawasan yang luas tentang kerugian dan manfaat pembangunan PLTA, sama sekali tidak terbukti. Karena respondent yang sarjana juga memiliki pengetahuan yang umum dan sama dengan respondent lainnya yang tidak sekolah. Respondent yang memiliki pengetahuan tentang

kerugian dan bersikap tidak setuju dengan pembangunan PLTA ini justru berasal dari respondent di tingkat pendidikan SD-SLTA.

Berikut diketengahkan gambar tingkat pendidikan respondent yang tidak setuju dengan PLTA ini.

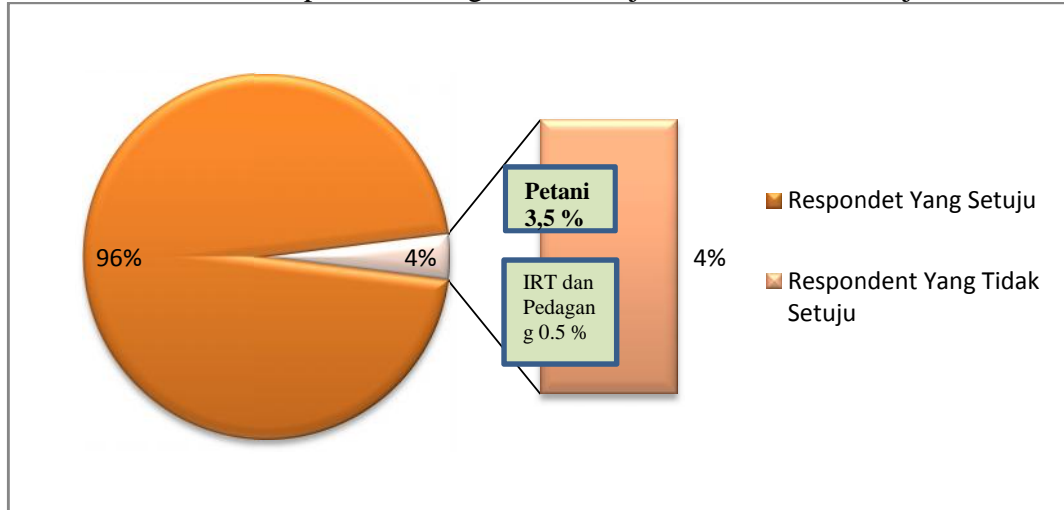
Gambar 6.3
Prosentase Respondent yang Tidak Setuju Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar di atas menunjukkan bahwa diantara respondent yang tidak setuju, yang paling banyak adalah respondent tamatan SLTP. Dengan demikian jenjang pendidikan tidak memberikan signifikansi bagi kekritisn respondent terhadap dampak pembangunan terhadap lingkungan.

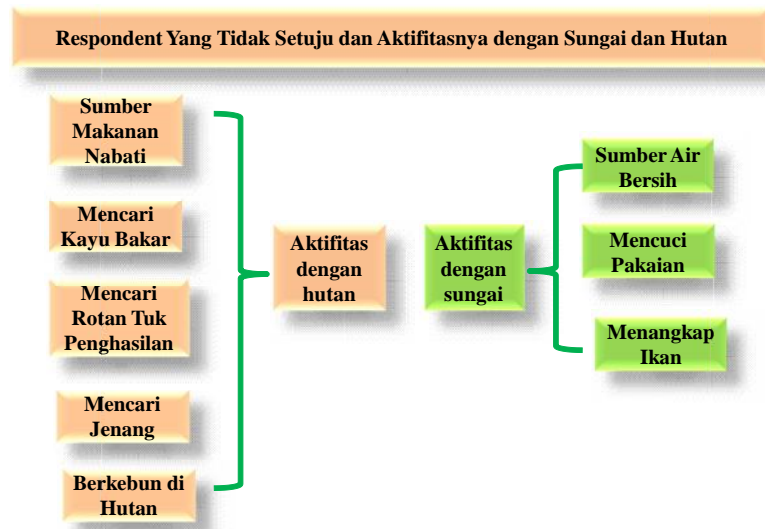
Bagian yang lebih mempengaruhi sikap respondent adalah terkait pekerjaan respondent, dan intensitas aktifitasnya dengan sungai dan hutan. Meskipun tidak serta merta respondent yang punya aktifitas tinggi dengan sungai dan hutan bisa serta merta menjadi kritis terhadap dampak lingkungan. Tetapi yang pasti berdasarkan data, hampir seluruh respondent yang bersikap tidak setuju adalah para petani. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6.4
 Prosentase Respondent Yang Tidak Setuju Berdasarkan Pekerjaan



Para Petani ini hampir seluruhnya memiliki intensitas aktifitas yang tinggi dengan sungai dan hutan. Berikut gambaran aktifitas respondent yang tidak setuju dengan sawah dan hutan.

Gambar 6.5
 Respondent yang tidak setuju dan Aktifitasnya dengan sungai dan Hutan



Respondent yang tidak menyetujui pembangunan PLTA Peusangan, memiliki kepentingan yang besar dengan sungai sebagai sumber air bersih keluarga. Sementara hutan menjadi sumber makanan juga menjadi lahan untuk mendapatkan

penghasilan. Pengetahuan mereka terkait kerugian yang dapat ditimbulkan oleh PLTA, menimbulkan kekhawatiran terganggunya aktifitas mereka dgn sungai dan hutan ini.

Dari segi sumber informasi diketahui juga bahwa sebagian besar respondent mendapatkan informasi dari teman/saudara/tetangga, termasuk respondent yang bersikap tidak setuju. Hal ini mengindikasikan adanya interaksi sosial yang tinggi, yang berpeluang menjadi media dan proses saling mempengaruhi. Adanya 96 % respondent yang bersikap setuju menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan bersama terkait pembangunan PLTA. Meski pengetahuan bersama ini hanya sebatas dugaan manfaat pembangunan PLTA bagi mereka.

Demikianlah pendapat masyarakat terkait pembangunan PLTA yang pada prinsipnya berangkat dari pengetahuan mereka yang terbatas (manfaatnya saja), sehingga tidak terfikir oleh mereka kerugian yang akan mereka hadapi. Pengetahuan yang terbatas ini pula lah yang menggiring sikap sebagian respondent untuk menyetujui pembangunan ini. Harapan besar mereka adalah adanya perubahan nasib yang mereka dapatkan setelah PLTA selesai di bangun. Harapan yang cenderung bersifat praktis dengan tidak mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Sehingga menjadi kewajiban pemerintahlah untuk mencerdaskan masyarakat terkait pembangunan dan lingkungan.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil survey diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu sebesar 61% dari 304 responden telah mengetahui tentang rencana pembangunan PLTA V Peusangan, dan hanya 39 % yang belum mengeahui. Informasi yang diperoleh sebagian besar dari teman, saudara atau tetangga bukan dari pemerintah. Padahal dalam Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan disebutkan bahwa, “pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar: pemberian informasi yang transparan dan lengkap, kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat, penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, dan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.
2. Dari hasil survey juga diketahui bahwa sebagian besar responden atau sekitar 71,7 % tidak mengetahui kerugian dari pembangunan PLTA, baik bagi lingkungan, air, hewan maupun bagi masyarakat, dan hanya 38, 3 % yang mengetahui. Hal ini terjadi karena informasi tentang kerugian dari pembangunan PLTA tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, dan masyarakat sedikit sekali dilibatkan dalam melakukan analisis dampak lingkungan pada saat perencanaan pembangunannya. Akan tetapi keuntungan dari pembangunan PLTA diketahu dengan baik oleh masyarakat, dan tidak terbatas pada pendidikan tinggi atau jenis kelamin. Sebagian besar responden atau sekitar 74 % mengetahui keuntungan dari pembangunan PLTA V Peusangan. Pengetahuan ini dioahami, karena informsi tentang PLTA sangat

mudah ditemui, baik saat dibangku sekolah, media maupun dari pembicaraan sehari-hari masyarakat, sementara informasi tentang kerugian dari pembangunan PLTA, atau pengelolaan sumber daya alam lainnya jarang ditemui dan jarang disosialisasikan kepada masyarakat, baik oleh pemerintah maupun berbagai pihak lainnya.

3. Hasil survey menunjukkan sebagai besar responden, yaitu sekitar 96 % menyetujui perencanaan pembangunan PLTA, karena menganggap pembangunan PLTA ini akan berdampak positif bagi kecukupan arus listrik yang selama ini terbatas di wilayah mereka, dan mereka akan mendapatkan keuntungan secara finansial karena ada pembebasan tanah untuk pembangunan tersebut, dan hanya 4 % yang tidak setuju. Persetujuan ini sangat terkait dengan pengetahuan mereka tentang keuntungan dari PLTA dan keterbatasan pengetahuan mereka tentang kerugian dari pembangunan PLTA tersebut. Keterbatasan pengetahuan dan informasi akan berdampak pada sikap terhadap sesuatu, termasuk juga pada rencana pembangunan PLTA Peusangan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil survey di atas rekomendasi yang diberikan untuk menjawab berbagai permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan berbagai pihak terkait lainnya harus memberikan informasi yang baik dan menyeluruh terhadap masyarakat yang berada di desa-desa yang diperkirakan akan terdampak dari pembangunan PLT V Peusangan, dan melibatkan mereka untuk proses analisis dampak lingkungan dan dampak sosial dari pembangunan PLTA tersebut, dengan memperhatikan partisipasi perempuan dan kelompok rentan.
2. Pemerintah dan pihak-pihak yang concern untuk isu lingkungan termasuk NGO internasional, nasional maupun lokal untuk lebih banyak memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat

tentang pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dan kerugian dari pembangunan yang akan berdampak pada lingkungan, manusia, hewan dan koridornya, juga tumbuh-tumbuhan yang ada disekitarnya termasuk kecukupan air bagi masyarakat, dan sungai yang terus mengalir serta habitat yang ada di dalamnya.

3. Kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk menguji kembali persetujuan masyarakat terhadap pembangunan PLTA, dengan melibatkan jumlah masyarakat yang diperkirakan akan terdampak secara lebih luas, dengan terlebih dahulu menyampaikan informasi tentang dampak dari pembangunan PLTA kepada masyarakat dan juga lingkungan.

